



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Oleh :

**Aditya Priyanto Putra
090810301041**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**Aditya Priyanto Putra
090810301041**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada :

1. Ibunda ku Sulih Utami Dewi dan Ayahanda Edy Supriyanto tercinta, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, nasihat dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah bagi keberhasilanku ;
2. Adik ku Rediyanto Putra tercinta yang selalu mendukung, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala perhatian dan doanya ;
3. Tante ku Ratna Utari Dewi dan Paman Arik Haryono tersayang, yang selalu memberi nasehat, dukungan, dan semangat untuk segera menyelesaikan studi;
4. Guru-guruku dari SD hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar;
5. Dosen Pembimbing ku Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. dan Indah Purnamawati, SE., M.Si., Ak. yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing ku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perhatian dan tanggung jawab yang tinggi;
6. Bapak Lucas Chriswantara beserta seluruh keluarga yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan penuh dalam menunjang kelancaran penyusunan skripsi ini;
7. Almamater tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Kebesaran bukan terletak pada kekuatan yang kita miliki, tetapi pada cara kita mempergunakan kekuatan itu dengan benar.

(Henry Word Esecher)

Katakanlah: Jika aku kalah, aku akan bersabar. Jika aku menang, aku akan tetap rendah hati.

(Mario Teguh)

Jadilah petarung muda yang disegani, lalu mendewasa menjadi orang bijak yang sejatinya tetap petarung.

(Mario Teguh)

Hidup adalah perjuangan dan Sabar adalah Kemenangan

(Hitam Putih)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Priyanto Putra

NIM : 090810301041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Maret 2013

Yang menyatakan,

Aditya Priyanto Putra

NIM 090810301041

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PT. PLN DISTRIBUSI JAWA TIMUR)**

Oleh
ADITYA PRIYANTO PUTRA
NIM 090810301041

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.
Dosen Pembimbing II : Indah Purnamawati, SE., M.Si., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi
Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)

Nama Mahasiswa : Aditya Priyanto Putra

NIM : 090810301041

Jurusan : S-1 AKUNTANSI

Yang Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.
NIP 19640809 199003 2 001

Indah Purnamawati, SE., M.Si., Ak.
NIP 19691011 199702 2 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Alwan S. Kustono, SE, M.Si, Ak
NIP. 19720416 200112 1 001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI**

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN
(STUDI KASUS PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aditya Priyanto Putra

NIM : 090810301041

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

1 April 2013

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Taufik Kurrohman, SE, M.SA, Ak. (.....)
NIP 19820723 200501 1 002
2. Sekretaris : H. Rohman Effendi, SE, M.Si, Ak. (.....)
NIP 19710217 200003 1 001
3. Anggota : Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak. (.....)
NIP 19591110 198902 1 001

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP 19630614 199002 1 001

LEMBAR REVISI

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi
Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur)

Nama Mahasiswa : Aditya Priyanto Putra

NIM : 090810301041

Jurusan : S-1 AKUNTANSI

Mengetahui
Tim Penguji,
Ketua,

Taufik Kurrohman, SE, M.SA, Ak.

NIP. 19820723 200501 1 002

Sekretaris,

Anggota,

H. Rohman Effendi, SE, M.Si, Ak.

NIP. 19710217 200003 1 001

Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak.

NIP. 19591110 198902 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)

ADITYA PRIYANTO PUTRA

Jurusan SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penelitian ini mencoba menganalisis perlakuan akuntansi dan pelaporan tanggung jawab sosial pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi dalam memperoleh data dan informasi untuk di analisis. Berdasarkan hasil analisis PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengelola dua bentuk program CSR; sebagai perseroan adalah Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dan sebagai BUMN; Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas yang terpisah dari Laporan Keuangan Utama Perseroan menggunakan dasar PSAK 45-Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Sedangkan Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan secara keseluruhan dilaporkan sebagai Beban pada Laporan Keuangan Utama Perseroan, dalam Laporan Laba-Rugi diklasifikasikan dalam pos Beban Lain-lain dengan nama ComDev (*community development*). Aktivitas CSR PT. PLN (Persero) juga dilaporkan dalam *Sustainability Report* dalam bentuk *Narrative Reporting* dan telah menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI G3) sebagai dasar pelaporannya, sehingga telah memenuhi semua indikator pelaporan.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Sustainability Report*, *Global Reporting Initiative* (GRI), *Community Development* (ComDev), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L).

ABSTRACT

ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORTING (CASE STUDY ON PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)

ADITYA PRIYANTO PUTRA

Accounting, Faculty of Economics, University of Jember

This study tries to analyze accounting treatment and social responsibility reporting on PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. This study used interview and observation to obtain the required data for the analysis. Based on the analysis, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur managed two forms of CSR program; as a company, the program is called P3L (Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan) and as SOE (State-Owned Enterprises), the program is called PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). PKBL was reported in the Statement of Financial Position and the Statement of Activities apart from main Financial Statements, which was based on PSAK 45 - Nonprofit Financial Reporting Entity. While P3L was overall reported as expenses on the main financial statements of the company in the Consolidated Income classified as heading Other Expenses named ComDev (community development). The activities of PT. PLN (Persero)'s CSR were also reported in Sustainability Report in the form of a Narrative Reporting, and PT. PLN (Persero) has used Global Reporting Initiative (GRI G3) as the basis for the report, so it has complied with all reporting indicators.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability Report, Global Reporting Initiative (GRI), Community Development (ComDev), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L).

RINGKASAN

Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (Studi Kasus PT. PLN Persero Distribusi Jawa Timur); Aditya Priyanto Putra, 090810301041; 2013; 95 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pada perkembangannya banyak perusahaan yang hanya berfokus pada kegiatan operasi semata demi menghasilkan keuntungan yang besar dan bentuk akuntabilitas finansial demi memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder* perusahaan tersebut. Namun perlu disadari adanya dampak-dampak sosial yang akan ditimbulkan perusahaan dalam menjalankan operasinya tersebut. Sehingga pertanggungjawaban perusahaan pun tidak sebatas hanya kepada investor dan kreditur, juga kepada lingkungan sosial perusahaan.

Dipilihnya PT. PLN (Persero) sebagai obyek penelitian atas dasar pertimbangan bahwa listrik merupakan infrastruktur yang penting bagi kualitas hidup manusia juga sebagai penunjang berbagai kegiatan perekonomian (Handayati, 2008). Anggraini (2006) dalam kesimpulannya juga menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis yang tinggi (*high-profile*) cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Hal demikian menunjukkan pengaruh tanggung jawab sosial sangatlah besar terhadap keberlangsungan operasi perusahaan. Melihat luasnya operasi perusahaan yang orientasinya sebagai BUMN, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dengan beberapa program yang telah ditetapkan dan dijalankan, menjadi penting bagi PT. PLN (Persero) menerapkan *CSR Disclosure* (pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan) yang baik.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana implementasi tanggung jawab sosial yang telah dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Peneliti juga menganalisis kepatuhan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PerMen BUMN No.5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Selanjutnya peneliti menganalisis penerapan dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur serta pelaporannya; apakah disajikan dalam *sustainability report* dan telah sesuai dengan *Global Reporting Initiative* (GRI).

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat dua bentuk program CSR yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Implementasi tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) bisa dikatakan sudah baik. Penerapan Akuntansi untuk program tanggung jawab sosial perusahaan dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Program yang terpisah dengan Laporan Keuangan Utama Perusahaan. Laporan disusun dengan basis akrual dan menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011). Hal ini karena pertanggungjawaban program hanya diperuntukkan bagi pihak intern hanya sebatas penilaian kinerja pelaksana operasional dalam merealisasikan anggaran.

Sedangkan untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. PLN (Persero) yang berupa Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dimana sebagai bentuk kepatuhan perseroan dalam memenuhi UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan perseroan untuk melaksanakan tanggung

jawab sosial. Dilaksanakannya tanggung jawab sosial PT. PLN (persero) terlihat dari adanya pos Beban *Community Development* (ComDev) pada Laporan Laba-Rugi yang digolongkan pada bagian Beban Lain-lain. Diakui sebagai beban karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis ke depannya dan merupakan pengeluaran diluar operasi utama perusahaan, sehingga murni untuk program tanggung jawab sosialnya.

Selain dilaporkan dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas yang terpisah dari Laporan Keuangan utama perusahaan serta tercantum sebagai Beban dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan, PT. PLN (Persero) juga mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya itu dalam sebuah Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan Keberlanjutan tersebut disusun oleh Kantor Pusat PT. PLN (Persero) di Jakarta. Laporan tersebut telah mengacu pada GRI dimana telah memenuhi semua indikator unsur pelaporan. Serta sesuai dengan Batasan Pelaporan pada GRI ketika informasi yang diungkapkan tidak memiliki pengaruh dan dampak signifikan maka cukup disajikan dalam bentuk narasi.

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, maka penyusun berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. PLN PERSERO DISTRIBUSI JAWA TIMUR)” sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Fathorrozi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, S.E., MM., Ak., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. dan Ibu Indah Purnamawati, SE., M.Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Andriana, S.E., M.Sc. selaku Dosen Wali selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Kedua Orangtuaku Ayahku Edy Supriyanto dan ibuku Sulih Utami Dewi yang dengan sabar dan ketulusan hati mencurahkan cinta kasih sayangnya dan

dukungan berupa materi maupun semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

7. Adikku Tersayang Rediyanto Putra yang telah memberikan dukungan semangat dan bantuan.
8. Keluarga besar Bapak Lucas Chriswantara terima kasih atas semangat, dukungan, dan kasih sayangnya.
9. Para Narasumber Bapak Mirza, Bapak Djarot, dan Bapak Ahmad Faturroji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan informasi.
10. Sahabatku Teofilus Djaja Utama, Eva Nur Amalia, Sheila Tiffany Saragih, Dwi Astuti, Febrian Nanda Putra, dan Olyvia Putri Pratama terima kasih atas doa dan semangatnya selama ini.
11. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengungkapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dan akan memberikan sumbangasih bagi Universitas Jember.

Jember, 19 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN REVISI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)..	9
2.1.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	9
2.1.2 Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> bagi Perusahaan.....	11
2.1.3 <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Kebijakan Perusahaan ..	13

2.1.4 Teori Legitimasi.....	14
2.1.5 Pengukuran Biaya <i>Corporate Social Responsibility</i>	14
2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.....	15
2.2.1 Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.....	15
2.2.2 Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial	17
2.2.3 Indikator Penyajian Informasi dalam Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>)	20
2.2.4 Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	28
BAB 3. METODE PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Batasan Penelitian	33
3.3 Jenis Data	34
3.4 Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Metode Analisis Data	37
3.7 Bagan Penelitian.....	39
BAB 4. PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	40
4.1.2 Profil Perusahaan	40
4.1.3 Peran dan Tujuan Perusahaan.....	42
4.1.4 Visi dan Misi Perusahaan	42
4.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	43
4.2.1 Identifikasi Aktivitas Sosial Perusahaan	43
4.2.2 Perlakuan Akuntansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	48
4.2.2.1 Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	49
4.2.2.2 Laporan Keuangan Utama Perusahaan	51

4.2.2.3 Laporan Keberlanjutan Perusahaan (<i>Sustainability Report</i>)	56
4.3 Analisis dan Pembahasan	60
4.3.1 Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. PLN (Persero)	60
4.3.2 Laporan Keuangan PT. PLN (Persero)	69
4.3.3 Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) PT. PLN (Persero)	74
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Keterbatasan Penelitian	91
5.3 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Tabel Realisasi Penyaluran Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) tahun 2011 PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	53
4.2 Komparasi Indikator GRI dengan <i>Sustainability Report</i> PT. PLN (Persero)	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambaran Panduan GRI (<i>Global Reporting Initiative</i>)	21
2.2 Kebijakan Menetapkan Batasan GRI-G3 (<i>Reporting Guidelines</i>)	27
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	39
4.1 Format Laporan Posisi Keuangan PKBL BUMN	64
4.2 Format Laporan Posisi Keuangan PKBL PT. PLN (Persero)	65
4.3.1 Format Laporan Aktivitas PKBL BUMN	66
4.3.2 Format Laporan Aktivitas PKBL BUMN (Lanjutan)	67
4.4 Format Laporan Aktivitas PKBL PT. PLN (Persero)	68
4.5 Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 – CALK PT. PLN (Persero)	69
4.6 Beban ComDev PT. PLN (Persero)	71
4.7 Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Format Laporan Keuangan Unit PKBL BUMN
2. Daftar Wawancara
3. Laporan Posisi Keuangan PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa Timur
4. Laporan Aktivitas PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa Timur
5. Neraca Saldo PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa Timur
6. Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tahun 2010
7. Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tahun 2011
8. Beban ComDev PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 2009-2010
9. Beban ComDev PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 2011-2012
10. Daftar Sumber Wawancara
11. Surat Penelitian dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan yang berdiri tentunya memiliki suatu tujuan atas kegiatan yang dilakukannya baik untuk menghasilkan keuntungan maupun sebagai suatu bentuk pelayanan publik. Sehingga perusahaan berdiri bukan tanpa tujuan dan tanpa memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Keuntungan tersebut diperoleh sebagian besar dari hasil operasi perusahaan sehingga menghasilkan sejumlah pendapatan tertentu dengan ekspektasi laba tertentu. Untuk mencapai semua itu diperlukan suatu upaya bersama dan dukungan dari berbagai pihak. Pada perkembangannya banyak perusahaan yang hanya berfokus pada kegiatan operasi semata demi menghasilkan keuntungan yang besar dan bentuk akuntabilitas finansial demi memenuhi kebutuhan informasi *stakeholder* perusahaan tersebut. Namun perlu disadari adanya dampak-dampak sosial yang akan ditimbulkan perusahaan dalam menjalankan operasinya tersebut. Sehingga pertanggungjawaban perusahaan pun tidak sebatas hanya kepada investor dan kreditur, juga kepada lingkungan sosial perusahaan.

Dampak-dampak operasi perusahaan seperti polusi, eksploitasi tenaga kerja dan sumber energi serta penggunaan energi yang tidak berwawasan lingkungan akan berpengaruh pada kehidupan sosial di sekitarnya. Sehingga kehidupan dan kesejahteraan lingkungan sosial perusahaan perlu diperhatikan. Karena kesadaran masyarakat terhadap dampak operasi perusahaan pada kondisi sosialnya semakin penting dan menekan perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya.

Sebenarnya di Indonesia sendiri pengaturan terkait tanggung jawab sosial telah ada sejak lama, seperti telah adanya pembinaan usaha kecil oleh BUMN yang dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum

(Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Kemudian terbitnya keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop. Pada tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya adanya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No. Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, serta yang terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Sehingga pada dasarnya telah banyak regulasi yang mengatur pertanggungjawaban sosial bagi perusahaan terutama BUMN dan sudah selayaknya perusahaan-perusahaan tersebut mengungkapkan kontribusinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disadari bahwa selain pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan saja seperti investor dan kreditur, terdapat pula pihak-pihak sosial yang juga memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan operasi perusahaan. Sehingga CSR begitu penting untuk dilakukan. Seperti yang disebutkan dalam Kebijakan Kementerian BUMN tentang Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tahun 2010, Wasrin (2010) menjelaskan alasan diterapkannya CSR adalah berdasarkan pertimbangan untuk (1) memenuhi regulasi, hukum dan aturan yang mengaturnya, (2) sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif, (3) bagian dari strategi bisnis

perusahaan, (4) untuk memperoleh *licence to operate* dari masyarakat setempat, dan (5) bagian dari *risk management* perusahaan untuk meredam atau menghindari konflik sosial.

Begitu pentingnya penerapan CSR di Indonesia dengan segala regulasi dan hukum yang mengaturnya tentu bukan tanpa suatu tanggung jawab atas penerapannya. Akuntabilitas perusahaan dalam penerapan CSR pun menjadi penting agar informasi keuangan terkait kegiatan CSR perusahaan menjadi transparan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas sosialnya. Seperti yang disebutkan dalam PSAK No. 1 paragraf ke 12 (Revisi 2009) bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari laporan keuangan utama. Sehingga kesadaran suatu perusahaan akan pengungkapan tanggung jawab sosialnya menjadi penting, karena dengan demikian akan menunjukkan sejauh mana perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu Undang-Undang RI No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang SDA (sumber daya alam) untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut di laporan tahunan.

Dipilihnya PT. PLN (Persero) sebagai obyek penelitian atas dasar pertimbangan bahwa listrik merupakan infrastruktur yang penting bagi kualitas hidup manusia juga sebagai penunjang berbagai kegiatan perekonomian (Handayati, 2008). Pembangunan ekonomi yang berkembang dengan cepat menuntut PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero untuk menyediakan tenaga listrik dalam berbagai kebutuhan industri, ekonomi, perdagangan, pemerintahan dan bagi masyarakat luas. Sebagai salah satu BUMN, PT. PLN (Persero) yang kegiatan utamanya dalam penyediaan tenaga listrik tersebut tentunya rentan terhadap isu-isu maupun sentimen

negatif dari masyarakat yang terkait dengan dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan. Selain itu Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Hal demikian menuntut PT. PLN (Persero) untuk melakukan program-program tanggung jawab sosial.

Program tanggung jawab sosial perusahaan PT. PLN (Persero) itu sendiri antara lain adalah *Community Relation*, *Community Services*, dan *Community Empowering* (www.pln.co.id). Kegiatan *community relation* merupakan kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait, misalnya kegiatan sosialisasi instalasi listrik melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Berikutnya kegiatan *community services* yang merupakan program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum, seperti bantuan bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN sebagai contoh di Kelurahan Asemrowo, Surabaya yang berada di sekitar SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) 150kV Sawahan-Waru, bantuan sarana air bersih, dan masih banyak lagi. Sedangkan kegiatan *community empowering* terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lain, bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar SUTET yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM, pemberdayaan anggota PKK Asemrowo, Surabaya, serta bantuan pelatihan pengembangan budi daya tanaman organik di sekitar instalasi PLN.

Melihat luasnya operasi perusahaan yang orientasinya sebagai BUMN, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dengan beberapa program yang telah ditetapkan dan dijalankan, menjadi penting bagi PT. PLN (Persero) menerapkan *CSR Disclosure* (pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan) yang baik, guna

meredakan sentimen negatif yang ada dalam masyarakat dan memperlancar operasional perusahaan serta tidak terjadi suatu ketimpangan hasil yang diperoleh. Dimana nantinya terbentuk suatu keseimbangan antara perolehan laba perusahaan yang sesuai dengan legitimasi positif sebagai pengaruh (*outcome*) dari kegiatan pertanggungjawaban sosial yang telah diterapkan.

Beberapa penelitian terdahulu terkait tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan, seperti penelitian Sujono dan Winartie (2004) yang dalam penelitiannya membahas penerapan akuntansi sosial pada PT. Pupuk Sriwidjaja. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa biaya sosial dalam perusahaan tersebut terdiri dari biaya sosial yang terkait dengan karyawan, masyarakat, pengusaha kecil dan koperasi, konsumen, lingkungan, dan pemerintah. Latar belakang diterapkannya akuntansi sosial pada perusahaan tersebut adalah masih adanya sentimen negatif dari masyarakat yang disebabkan belum adanya pelaporan atas tanggung jawab sosialnya yang membuat tidak semua pihak bisa mengetahui tanggung jawab sosial PT. Pupuk Sriwidjaja tersebut. Akuntansi sosial memanglah suatu hal yang penting untuk dilakukan perusahaan sebagai suatu bentuk kepedulian perusahaan. Seperti yang disebutkan Luhglatno, (2007) bahwa ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan mengimplementasikan *corporate social responsibility*. Pertama, citra (*image*) positif dari masyarakat. Kedua, kemudahan perusahaan dalam akses kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*). Anggraini (2006) dalam kesimpulan penelitiannya juga menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajemen yang besar dan termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis yang tinggi (*high-profile*) cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Hal demikian menunjukkan

pengaruh tanggung jawab sosial sangatlah besar terhadap keberlangsungan operasi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk program CSR yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur?
3. Apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 – Perseroan Terbatas pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN No. 5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan?
4. Apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menyajikan laporan mengenai tanggung jawab sosial di luar laporan keuangan utama seperti yang disebutkan dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan?
5. Apakah laporan tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) disajikan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dan telah sesuai dengan GRI 2006-*Reporting Guidelines* tentang *Sustainability Reporting Guidelines*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis sejauh apa implementasi tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis penerapan dan pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur telah melaporkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 – Perseroan Terbatas pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Peraturan Menteri BUMN No. 5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
4. Untuk menganalisis apakah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menyajikan laporan mengenai tanggung jawab sosial diluar laporan keuangan utama seperti yang disebutkan dalam PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
5. Untuk menganalisis apakah laporan tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) disajikan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) dan telah sesuai dengan GRI 2006-*Reporting Guidelines* tentang *Sustainability Reporting Guidelines*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan yang lebih luas kepada penulis dalam memahami, menganalisa permasalahan yang ada serta memberikan usulan dalam penerapan

perlakuan akuntansi yang sesuai bagi pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur saat ini.

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang telah ada agar menjadi lebih baik.
3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi berbagai pihak untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

2.1.1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam Paparan Kebijakan Kementerian BUMN tentang CSR tahun 2010 pada acara rapat koordinasi tentang Penguatan Kerjasama Pengelolaan Peluang Kerja dan Peluang Usaha, Wasrin (2010) selaku Asdep Pembinaan Kemitraan dan Bina Lingkungan menyebutkan bahwa perkembangan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pertama kali muncul saat diterbitkannya buku karya Howard R Bowen yang berjudul *Social Responsibility of the Businessman* pada tahun 1953 yang selanjutnya Howard R Bowen dikenal sebagai Bapak CSR. CSR mulai berkembang pada tahun 1960 dimana persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Kemudian KTT Bumi (*earth summit*), tahun 1992 di Rio De Janeiro menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang harus dilakukan. Lalu *World Summit on Sustainable Development (WSSD)* tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan memunculkan konsep *Social Responsibility*, yang mengiringi dua konsep sebelumnya yaitu *Economic and Environment Sustainability*. Perkembangan berikutnya adalah rencana diberlakukannya sertifikasi ISO 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* pada tahun 2010.

Banyak sekali prinsip-prinsip terkait CSR yang telah berkembang. Menurut Luhglatno (2007) *corporate social responsibility* adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dijelaskan bahwa penerapan *corporate social responsibility* merupakan bentuk implementasi

GCG (*good corporate governance*) perusahaan karena salah satu prinsip GCG adalah masalah tanggung jawab (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

Menurut *The World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) dalam Handayani (2008) definisi CSR adalah sebagai berikut :

“Corporate social responsibility is the continuing comitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of local community and society at large.”

Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti-komuniti setempat (lokal), dan masyarakat luas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Regulasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya BUMN di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dengan adanya regulasi terkait penerapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* bagi BUMN tersebut mengasumsikan betapa pentingnya praktek tanggung jawab sosial tersebut sehingga BUMN pun sebagai unit

usaha milik negara pun juga dituntut menerapkan tanggung jawab sosial. Kewajiban diterapkannya tanggung jawab sosial bagi perusahaan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

2.1.2. Manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi Perusahaan

Menurut Suharto (2006) dalam Yentifa dan Handayani (2008) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal dengan *Triple Bottom Line*, yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*. Masing-masing maksudnya adalah sebagai berikut :

1. *Profit*

Perusahaan harus tetap berorientasi untuk terus beroperasi dan berkembang.

2. *People*

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

3. *Planet*

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan kelanjutan keragaman hayati.

Sehingga dalam prakteknya fokus tanggung jawab sosial perusahaan adalah kepada tiga hal tersebut (Yentifa dan Handayani, 2008). Dengan profitabilitas yang memadai, tentu perolehan laba menjadi hal yang utama dan penting karena laba merupakan salah satu alat ukur perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Pencapaian laba yang optimal akan menunjang operasional perusahaan dan pemenuhan kewajiban perusahaan. Perhatian kepada masyarakat pun menjadi hal yang tidak kalah penting bagi perusahaan. Perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan terkait peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kompetensi perlu

dibuat. Selanjutnya partisipasi perusahaan dalam pelestarian lingkunganpun juga menjadi hal yang penting mengingat perusahaan telah memperoleh manfaat atas penggunaan lahan yang ada. Dengan pelestarian lingkungan, perusahaan berarti juga mencegah terjadinya dampak negatif lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat kerusakan lingkungan dan juga mencegah adanya pembengkakan biaya untuk penanggulangan bencana di masa yang akan datang.

Harahap (2005) dalam Luhgiatno (2007) mengemukakan beberapa alasan perlunya perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial yaitu:

1. Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini sangat menguntungkan perusahaan.
2. Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan, akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor, dan lain-lain.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari pembatasan kegiatan perusahaan.
5. Dapat menunjukkan respon positif perusahaan terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat.
6. Sesuai dengan keinginan para pemegang saham, dalam hal ini publik.
7. Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang terkadang suatu kegiatan yang dibenci masyarakat tidak mungkin dihindari.
8. Membantu kepentingan nasional, seperti konversi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja, dan lain-lain.

Kotler dan Lee (2005) dalam Masnila (2006) menyatakan bahwa partisipasi perusahaan dalam berbagai bentuk tanggung jawab sosial dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain:

1. Meningkatkan penjualan dan *market share*.
2. Memperkuat *brand positioning*.
3. Meningkatkan *image* dan pengaruh perusahaan.
4. Meningkatkan kemampuan mempertahankan (*retain*) karyawan.
5. Menurunkan biaya operasional.
6. Meningkatkan hasrat bagi investor untuk berinvestasi.

2.1.3. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Kebijakan Perusahaan

Menurut Hasibuan (2004) dalam Handayati dan Laksiani (2008) tanggung jawab sosial perusahaan memiliki empat jenis tanggung jawab, yaitu yang bersifat ekonomis, artinya memperoleh laba bagi pemegang saham; legal, mematuhi peraturan dan hukum (berhubungan dengan lingkungan dan sebagainya); etika atau *ethical* dimana perusahaan harus memenuhi kaidah-kaidah normatif seperti berlaku jujur, transparan, tidak ada diskriminasi ras atau gender dan tidak korupsi. Tanggung jawab selanjutnya bersifat *discretionary*, yaitu tanggung jawab yang sebenarnya tidak harus dilakukan, tetapi atas kemauan sendiri.

Hamann dan Acutt (2003) dalam Handayati dan Laksiani (2008), menjelaskan terdapat dua motivasi yang mendasari diterimanya konsep CSR oleh kalangan bisnis. Pertama, akomodasi, yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, *superficial*, dan parsial. CSR dilakukan untuk memberi kesan korporasi yang peduli terhadap kepentingan sosial. Realisasi CSR yang bersifat akomodatif tidak melibatkan perubahan mendasar dalam kebijakan bisnis korporasi

sesungguhnya. Kedua, legitimasi, yaitu motivasi yang bertujuan untuk mempengaruhi wacana. Motivasi ini berargumentasi wacana CSR mampu memenuhi fungsi utama yang memberikan keabsahan pada sistem kapitalis dan lebih khusus, kiprah para korporasi raksasa.

2.1.4. Teori Legitimasi

Deegan (2006) dalam Chariri dan Nugroho (2009) menyebutkan legitimasi merupakan hal yang penting bagi eksistensi sebuah perusahaan. Sehingga berbagai upaya dilakukan perusahaan untuk memperoleh legitimasi. Organisasi berusaha memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan diakui (*legitimate*) oleh pihak luar, yaitu dengan cara perusahaan beroperasi sesuai batasan-batasan dan norma atau nilai yang berlaku. Perusahaan seharusnya sadar bahwa keberlangsungan hidup perusahaan tergantung dari hubungan perusahaan dengan lingkungan sosialnya. Jadi perusahaan dapat kehilangan legitimasinya bila hubungannya dengan lingkungan sosialnya tidak baik dalam artian tidak sesuai dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang berikutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Guthrie dan Parker (1990) dalam Sayekti dan Wondabio (2007) salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis adalah dengan dilakukannya pengungkapan informasi CSR.

2.1.5. Pengukuran Biaya *Corporate Social Responsibility*

Dalam pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya terdapat dua dampak yang timbul, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Masalah yang timbul adalah bagaimana mengukur kedua dampak tersebut sebagai *social cost* dan *social benefit* (Luhglatno, 2007).

Zulfikar (1997) dalam Luhglatno (2007) mengusulkan beberapa teknik pengukuran manfaat dan biaya sosial yaitu:

1. Penilaian pengganti (*surrogate valuation*). Jika nilai dari sesuatu tidak dapat secara langsung ditemukan, maka kita dapat menyetimasiannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang sedang diukur.
2. Teknik survey (*survey techniques*). Survey dilakukan dengan mengobservasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan dampak usaha dari perusahaan terkait bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang diinginkan. Dalam mengumpulkan informasi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, responden harus mempunyai suatu pengertian yang jelas mengenai dampak yang sedang diukur dalam dirinya. Kedua, responden harus mampu menghubungkan dampak ini ke unit moneter baik secara langsung atau menggunakan nilai pengganti. Ketiga, responden harus mau memberikan jawaban jujur.
3. Biaya perbaikan dan pencegahan (*restoration or avoidance cost*). Pengukuran biaya dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan.
4. Penilaian (*appraisal*) oleh tim independen. Penaksiran yang dilakukan oleh pihak independen dalam menilai asset berwujud perusahaan.
5. Putusan pengadilan (*court decisions*). Penilaian dan penghitungan atas kerusakan atau sejumlah biaya tertentu melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan misalnya denda akibat suatu dampak dari kegiatan sering menunjukkan nilai sosial.

2.2. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

2.2.1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Akuntansi dengan pelaporan keuangan sebagai produk utamanya diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengungkapkan dan melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan

sosialnya (Winartie dan Sujono, 2004). Selanjutnya Luhgianto (2007) menjelaskan untuk mendapatkan gambaran tentang akuntansi sosial perusahaan, entitas perusahaan harus mampu mengakses lingkungan sosialnya, setelah itu untuk menindaklanjuti dan mengukur kepekaan tersebut perusahaan memerlukan informasi secara periodikal, sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak (*shareholders, stakeholders dan debtholders*).

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial atau *Social Responsibility Accounting* oleh Ramanathan (Belkaoui, 2000) dalam Luhgianto (2007) didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran; yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial berfokus untuk mencoba menunjukkan gambaran komprehensif aktivitas dan interaksi organisasi dengan lingkungan eksternalnya, jadi dapat diketahui informasi tentang sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusinya baik positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Luhgianto, 2007).

Menurut Ramanathan dalam (Winartie dan Sujono, 2004) ada tiga tujuan dari akuntansi sosial, dua tujuan pertama berhubungan dengan proses pengukuran sedangkan tujuan ketiga berkaitan dengan proses pelaporan. Pertama, akuntansi sosial digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial bersih perusahaan setiap periode, yang tidak hanya meliputi sosial cost dan social benefit yang diinternalisasi perusahaan tetapi juga kenaikan dari dampak eksternal bagi berbagai segmen sosial yang berbeda. Kedua, untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan yang secara langsung mempengaruhi hubungan sumber daya dan status kekuasaan individu, komunitas, segmen sosial dan generasi adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas di satu sisi dan

aspirasi legitimasi individu di sisi lainnya. Ketiga, memungkinkan cara yang optimal bagi perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, performa, dan kontribusi perusahaan terhadap tujuan sosial. Informasi yang relevan ini disajikan untuk pertanggungjawaban publik dan juga sebagai fasilitas dalam mengambil keputusan mengenai pilihan sosial serta alokasi sumber daya sosial

2.2.2. Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Adapun alasan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela (Henderson and Peirson, 1998 dalam Luhglatno,2007) antara lain:

1. *International decision making*; manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.
2. *Product differentiation*; manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki inisiatif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini mendorong informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.

3. *Enlightened self interest*; perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para *stakeholder* yang terdiri dari *stockholder*, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen perusahaan dan karyawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat (Hery, 2008). Menurut PSAK No. 1 paragraf ke 7 (Revisi 2009), Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan (Hery, 2008). Menurut PSAK No. 1 paragraf ke 7 (Revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan seperti kebijakan akuntansi perusahaan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi

arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Sebenarnya telah ada dasar yang menunjukkan bahwa perusahaan atau entitas hendaknya melaporkan bentuk laporan lain selain laporan keuangan utama. Dalam PSAK No. 1 Paragraf ke 12 (Revisi 2009) dinyatakan bahwa :

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Regulasi terkait pelaporan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat (2c) yang mengatur Laporan Tahunan, dimana laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Zhegal & Ahmed (1990) dalam Anggraini (2006) mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Energi, meliputi konservasi energi dan efisiensi energi.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.

5. Produk, meliputi keamanan dan pengurangan polusi.

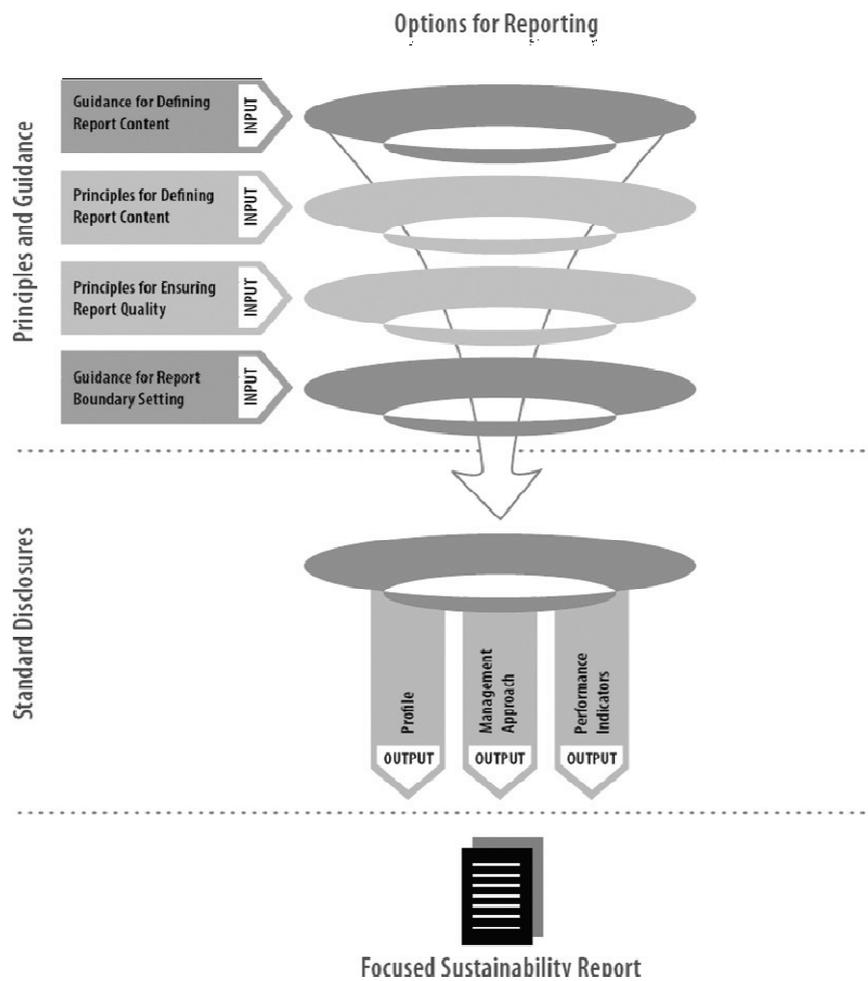
Pada kenyataannya pengungkapan CSR bervariasi di masing-masing negara. Hal demikian dikarenakan perbedaan persepsi terhadap isu yang ada. Beberapa dianggap penting oleh suatu negara tertentu mungkin akan menjadi kurang penting bagi negara lain. Adanya perbedaan tujuan dari pengungkapan CSR pun juga mempengaruhi praktek pengungkapan CSR itu sendiri. Beberapa perusahaan melakukan pengungkapan CSR untuk meningkatkan citra perusahaan dan ingin dilihat sebagai warga negara yang bertanggung jawab (Ahmad et al. 2003) atau perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya (Anggraini, 2006).

2.2.3. Indikator Penyajian Informasi dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Global Reporting Initiative, (2006) menjelaskan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemilik kepentingan baik internal maupun eksternal.

Tidak semua entitas memiliki pelaporan dalam bentuk dan cara yang sama. Pendekatan dalam melaporkan kegiatan entitas akan tergantung pada kombinasi pengendalian organisasi serta apakah pengungkapan berhubungan dengan kinerja operasi, kinerja manajemen, atau penggambaran informasi. Menentukan signifikansi sebuah entitas dalam pembuatan laporan atau dalam mempertimbangkan penambahan batasan akan sangat tergantung pada skala dari dampak keberlanjutannya. Entitas yang memiliki dampak signifikan biasanya menghasilkan risiko atau peluang yang lebih besar kepada organisasi atau pihak yang berkepentingan, dan karenanya menjadikan entitas tersebut sebagai entitas di mana organisasi harus bertanggung jawab atau akuntabel (Sumber : *GRI-Reporting Guidelines*, 2006).

Orientasi panduan pembuatan laporan berkelanjutan GRI terdiri atas prinsip-prinsip pelaporan, panduan pelaporan dan standar pengungkapan (termasuk di dalamnya indikator kinerja).



Gambar 2.1: Gambaran Panduan GRI

Sumber : GRI (*Global Reporting Initiative*) – *Reporting Guidelines 2006*

Untuk membantu dalam menentukan apa yang harus dilaporkan, bagian *principles and guidance* (panduan dan prinsip pelaporan) ini mencakup prinsip dan pelaporan terkait materialitas, pelibatan pemilik kepentingan, konteks keberlanjutan

dan kelengkapan laporan beserta seperangkat alat penguji singkat untuk setiap prinsip. Bagian *standard disclosure* berisi standar pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keberlanjutan. *Global Reporting Initiative (GRI G.3 – Reporting Guidelines)* mengidentifikasi informasi yang relevan dan material di kebanyakan organisasi serta kepentingan dari kebanyakan pemilik kepentingan dalam melaporkan tiga tipe standar pengungkapan:

1. Strategi dan Profil: Pengungkapan yang membentuk keseluruhan konteks untuk dapat memahami kinerja organisasi, seperti strategi yang dimiliki, profil, dan tata kelola.
2. Pendekatan Manajemen: Pengungkapan yang mencakup mengenai bagaimana sebuah organisasi menggunakan topik tertentu untuk memberikan konteks dalam memahami kinerja pada sebuah bidang spesifik tertentu.
3. Indikator Kinerja: Indikator yang memberikan perbandingan informasi terkait kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi.

Berikut merupakan uraian indikator unsur-unsur informasi yang perlu tersaji dalam pelaporan *sustainability report* tersebut berdasarkan GRI G3 (2011) – Comparison Sheet:

1. Profil (*Profile*)
 - a. Strategi dan Analisis (*Strategy and Analysis*)
 - i. Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling senior dalam organisasi (misalnya CEO, ketua, atau posisi senior sejenis) mengenai relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strateginya.
 - ii. Deskripsi dampak, risiko dan peluang utama.
 - b. Profil Organisasi (*Organizational Profile*)
 - i. Nama organisasi.
 - ii. Merek, produk dan/atau jasa utama

- iii. Struktur organisasi, termasuk didalamnya divisi utama, perusahaan yang menjalankan usaha (*operating companies*), anak perusahaan dan usaha patungan.
 - iv. Lokasi kantor pusat organisasi
 - v. Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di mana operasi utama dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan.
 - vi. Sifat kepemilikan dan bentuk legal.
 - vii. Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan geografi, sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat).
 - viii. Skala organisasi.
 - ix. Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan terkait ukuran, struktur dan kepemilikan.
 - x. Penghargaan yang diterima dalam periode laporan.
- c. Parameter Laporan (*Report Parameters*)
- i. Periode pelaporan
 - ii. Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada)
 - iii. Siklus pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya)
 - iv. Alamat kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya
 - v. Proses dalam menetapkan isi laporan
 - vi. Batasan laporan
 - vii. Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan
 - viii. Dasar untuk melaporkan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas yang disewakan, kegiatan melalui *outsourcing*, serta entitas lainnya yang berpengaruh signifikan dan dapat diperbandingkan informasinya setiap saat/antar organisasi.
 - ix. Teknik pengukuran data dan dasar penghitungannya
 - x. Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap informasi yang disediakan dalam laporan sebelumnya

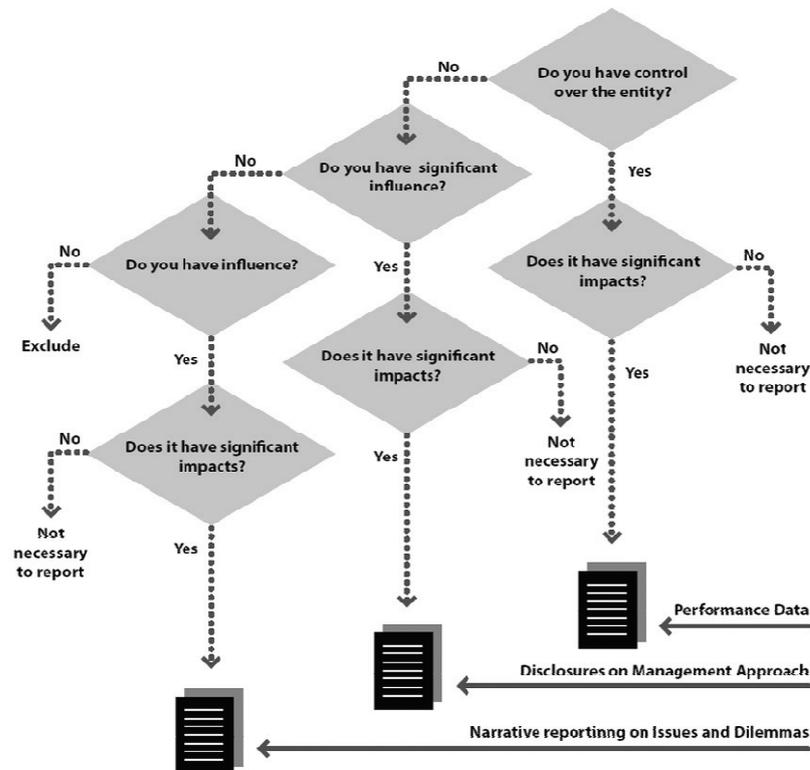
- xi. Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya.
- d. Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan (*Governance, Commitments, and Engagement*)
 - i. Struktur tata kelola organisasi
 - ii. Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola tertinggi.
 - iii. Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif
 - iv. Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan.
 - v. Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan pengelola tertinggi dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.
 - vi. Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah laku, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari implementasinya.
 - vii. Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi manajemen dan identifikasi organisasi terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko dan peluang yang relevan.
 - viii. Proses dalam mengevaluasi kinerja
 - ix. Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan/atau organisasi advokasi nasional/internasional.
 - x. Daftar kelompok *stakeholder* yang dilibatkan oleh organisasi
 - xi. Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih *stakeholder* yang akan dilibatkan
 - xii. Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan *stakeholder*, termasuk di dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompoknya.

2. Indikator Kinerja (*Performance Indicators*)
 - a. Lingkungan (*Environmental*)
 - i. Aspek material
 - ii. Aspek air
 - iii. Aspek biodiversitas (keanekaragaman hayati)
 - iv. Aspek emisi, efluen, dan limbah
 - v. Aspek produk dan jasa
 - vi. Aspek kepatuhan
 - vii. Aspek pengangkutan/transportasi.
 - b. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)
 - i. Aspek investasi dan pengadaan
 - ii. Aspek non diskriminasi
 - iii. Aspek kebebasan berserikat dan berkumpul
 - iv. Aspek pekerja anak
 - v. Aspek kerja paksa dan kerja wajib
 - vi. Aspek praktek/tindakan pengamanan
 - vii. Aspek hak penduduk asli.
 - c. Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (*Labor Practices and Decent Work*)
 - i. Aspek ketenagakerjaan khusus untuk bidang dan utilitas tertentu
 - ii. Aspek tenaga kerja/hubungan manajemen
 - iii. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja
 - iv. Aspek pelatihan dan pendidikan
 - v. Aspek keberagaman dan kesempatan setara
 - d. Masyarakat (*Society*)
 - i. Aspek keterbukaan terhadap masyarakat
 - ii. Aspek rencana tanggap darurat
 - iii. Aspek komunitas
 - iv. Aspek korupsi

- v. Aspek kebijakan publik
- vi. Aspek kelakuan tidak bersaing
- vii. Aspek kepatuhan
- e. Tanggung Jawab Produk (*Product Responsibility*)
 - i. Aspek pengungkapan
 - ii. Aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan
 - iii. Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa
 - iv. Aspek komunikasi pemasaran
 - v. Aspek keleluasaan pribadi pelanggan
 - vi. Aspek kepatuhan
- f. Ekonomi (*Economic*)
 - i. Aspek kinerja ekonomi
 - ii. Aspek kehadiran pasar
 - iii. Aspek dampak ekonomi tidak langsung
 - iv. Aspek ketersediaan dan keandalan
 - v. Aspek efisiensi sistem

3. Pendekatan Manajemen (*Management Approach*)

Berikut ini merupakan panduan dalam menetapkan batasan pelaporan informasi dalam *sustainability report* yang akan menentukan substansi laporan. Substansi laporan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kendali atas aktifitas terhadap entitas, ada atau tidaknya dampak signifikan dari aktifitas terhadap entitas, serta ada atau tidaknya pengaruh signifikan aktifitas terhadap entitas. Berdasarkan ketiga faktor tersebut akan menghasilkan bentuk laporan yang berupa data kinerja (*performance data*), pengungkapan berdasarkan pendekatan manajemen (*management approach*), serta pelaporan naratif (*narrative reporting*) seperti pada gambar berikut:



Gambar 2.2: Kebijakan Menetapkan Batasan

Sumber : GRI (*Global Reporting Initiative*) – *Reporting Guidelines 2006*

Adapun penjelasan dari bagan tersebut berdasarkan GRI G.3 – *Reporting Guidelines* adalah sebagai berikut:

1. Sebuah laporan keberlanjutan harus memasukkan dalam batasannya semua entitas yang menghasilkan dampak signifikan bagi keberlanjutan (baik aktual atau potensial) dan atau semua entitas dimana organisasi memiliki kendali atau pengaruh signifikan terkait praktek dan kebijakan operasi dan keuangannya.
2. Entitas ini dapat dimasukkan dengan menggunakan baik indikator kinerja operasi, manajemen, atau dengan deskripsi naratif.
3. Pada tingkat minimal, organisasi harus memasukkan entitas berikut dalam laporannya melalui pendekatan berikut :

- a. Entitas dimana organisasi memiliki kendali harus tercakup oleh indikator Kinerja Operasi
 - b. Entitas dimana organisasi memiliki pengaruh signifikan harus tercakup dalam Pengungkapan Pendekatan Manajemen
4. Batasan pengungkapan narasi harus memasukkan entitas dimana organisasi tidak memiliki kendali/pengaruh signifikan, tetapi memiliki keterkaitan dengan tantangan utama yang dihadapi organisasi karena dampak yang ditimbulkannya.
 5. Laporan harus mencakup semua entitas dalam Batasan Lapornya. Dalam proses persiapan laporan, organisasi dapat menentukan untuk tidak mengumpulkan data terkait entitas atau kelompok entitas tertentu atas dasar efisiensi, dalam artian kebijakan tersebut tidak akan memberikan perubahan hasil akhir dari sebuah Pengungkapan.

2.2.4. Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

PT. PLN (persero) selain sebagai perseroan yang bergerak dibidang bisnis penyedia tenaga listrik di Indonesia juga merupakan salah satu BUMN (badan usaha milik negara). Dalam Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Sehingga hal ini mengharuskan PT. PLN (Persero) melakukan tanggung jawab sosial serta melaporkannya.

Selain adanya regulasi berkenaan dengan keharusan dilaksanakannya program tanggung jawab sosial oleh BUMN dalam hal ini bernama Program Kemitraan dan Bina Sosial, pedoman akuntansinya pun telah diatur dalam Surat

Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Revisi tahun 2012. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa tujuan pedoman akuntansi PKBL ini merupakan pedoman bagi unit PKBL dalam rangka menyelenggarakan pencatatan atas transaksi program. Acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan unit PKBL menggunakan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Digunakannya dua acuan tersebut atas dasar pertimbangan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dimaksudkan untuk digunakan oleh unit PKBL BUMN. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam SAK ETAP bahwa standar akuntansi tersebut dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dimana merupakan entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Dalam hal ini entitas yang dimaksud adalah unit PKBL dan pengguna eksternal yang dimaksud adalah mitra PKBL terkait.

Adapun komponen laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Informasi dalam laporan posisi keuangan digunakan untuk menilai kemampuan Unit PKBL untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi liabilitasnya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Informasi likuiditas diberikan dengan cara:

- a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo

- b. Mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam liabilitas jangka pendek dan jangka panjang
- c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

- a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto
- b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain
- c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan Unit PKBL. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

- a. Penerimaan alokasi laba
- b. Penerimaan pengembalian pokok pinjaman
- c. Penerimaan jasa administrasi pinjaman
- d. Penerimaan bunga deposito, jasa giro
- e. Penyaluran pinjaman kemitraan

- f. Penyaluran hibah
- g. Penyaluran bina lingkungan

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

- a. Sumbangan berupa bangunan atau aset investasi
- b. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lainnya
- c. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lainnya

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan aktiva bersih, selain yang diakibatkan oleh aktivitas operasi dan aktivitas investasi, dan perubahan hutang pinjaman entitas. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

- a. Penerimaan kas dari BUMN Pembina yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang
 - b. Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana abadi.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan utama Catatan atas Lapoean Keuangan adalah memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
- b. Informasi yang disyaratkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Format laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN sesuai dengan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 terlampir pada Lampiran 1.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong dalam lingkup penelitian bidang akuntansi keuangan, karena membahas perlakuan akuntansi, pengukuran, pengakuan, sistem pelaporan, dan kebijakan perusahaan. Berdasarkan karakteristik masalahnya, penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu objek penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari obyek yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2009).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa analisis implementasi dan penerapan prosedur akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan program CSR yang dilakukan perusahaan BUMN di Surabaya dengan mengambil studi kasus pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Metode kualitatif dipandang tepat untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji daripada menggunakan metode kuantitatif, dikarenakan penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian.

3.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial dan pelaporannya pada suatu perusahaan yang merupakan salah satu BUMN di Indonesia yakni PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur. Dalam penelitian ini informasi yang akan dikaji hanya sebatas permasalahan terkait perlakuan akuntansi dan bentuk pelaporan dari aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga Peneliti membatasi lingkup penelitian pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian akan dilakukan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur khususnya pada fungsi CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan tanggung jawab Manajer Senior CSR dan Asisten Manajer CSR.
2. Penelitian yang dilakukan terkait pengukuran, pengakuan, hingga pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Penelitian hanya sebatas menganalisis perlakuan akuntansi yang diterapkan dan permasalahan yang dihadapi.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer ;

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2009).

2. Data Sekunder ;

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2009).

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Program CSR yang telah diimplementasikan oleh PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur.
2. Data Pencapaian Program CSR yang telah berjalan
3. Laporan Manajemen CSR serta Laporan Keuangan pada PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur. Hal ini guna mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang digunakan, serta bentuk penyajian laporan CSR itu sendiri.

3.4. Sumber Data

Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini berkaitan dengan aktivitas tanggung jawab sosial dari objek penelitian, sehingga sumber data berasal dari bagian-bagian dalam perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

1. Bagian Komunikasi, Hukum dan Administrasi (KHA) dan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari informasi yang telah diperoleh saat survei pendahuluan diketahui bahwa bagian KHA dan SDM merupakan bagian pelaksana/operasional yang bertanggung jawab atas berjalannya program tanggung jawab sosial. Dimana selanjutnya membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan program dan realisasi anggaran program untuk selanjutnya diserahkan pada bagian Keuangan dan Akuntansi guna diperiksa, dievaluasi, dan dicatat dalam laporan keuangan maupun laporan program di luar laporan keuangan utama. Sehingga, diharapkan diperoleh gambaran umum aliran pengelolaan keuangan CSR, yang selanjutnya dilakukan analisis perlakuan akuntansinya terhadap transaksi-transaksi yang lebih detail dan terperinci terkait program CSR perusahaan. Analisis yang dilakukan merupakan analisis penggunaan dana CSR.

2. Bagian Keuangan dan Akuntansi

Data dari bagian keuangan dan akuntansi berupa Laporan Keuangan PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui pada pos apakah CSR diakui. Untuk selanjutnya dilakukan penelusuran data keuangan melalui bagian Keuangan. Selain laporan keuangan data juga berupa bentuk lain laporan tanggung jawab sosial seperti *sustainability report* atau laporan khusus CSR PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Survei Pendahuluan

Dilakukan kunjungan pendahuluan ke obyek penelitian, hal ini dilakukan bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada manajemen dan melakukan observasi awal. Selain itu survei dilakukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari penelitian yang dilakukan pada manajemen serta untuk mengetahui keadaan umum perusahaan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendapatkan literatur yang relevan dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teoritis sebagai pedoman pelaksanaan penelitian.

3. Survei Lapangan

Penelitian dilakukan di PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur. Pada tahap ini dikumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain:

1. Dokumentasi

Mengumpulkan data berupa dokumen perusahaan baik yang bersifat umum

maupun spesifik yang terkait obyek penelitian terkait pengungkapan dan pelaporan CSR pada PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung objek fisik guna memperoleh data dan informasi yang lebih konkrit. Pengamatan dilakukan langsung di Kantor Distribusi PT. PLN (Persero) – Surabaya. Data dan informasi yang dimaksud adalah data keuangan yang mencerminkan pengelolaan CSR hingga pelaporannya dalam laporan keuangan perusahaan.

3. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengeksplorasi implementasi dan perlakuan akuntansi dari transaksi yang berkaitan dengan program CSR PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur. Wawancara yang dilakukan bersifat terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam proses ini diharapkan diperoleh informasi tambahan terkait kendala teknis dalam prosedur akuntansi yang digunakan pada pengelolaan CSR perusahaan. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang berhubungan dan bertanggung jawab dalam kegiatan dan pelaporan tanggung jawab sosial di PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur antara lain adalah bagian Keuangan dan Akuntansi, bagian KHA (komunikasi hukum dan administrasi), bagian SDM (sumber daya manusia), bagian Umum, dan bagian KSA (*knowledge, skill, and abilities*). Butir-butir pertanyaan dalam wawancara ini merujuk pada penelitian Sofyan (2012). Daftar pertanyaan wawancara terlampir pada Lampiran 2.

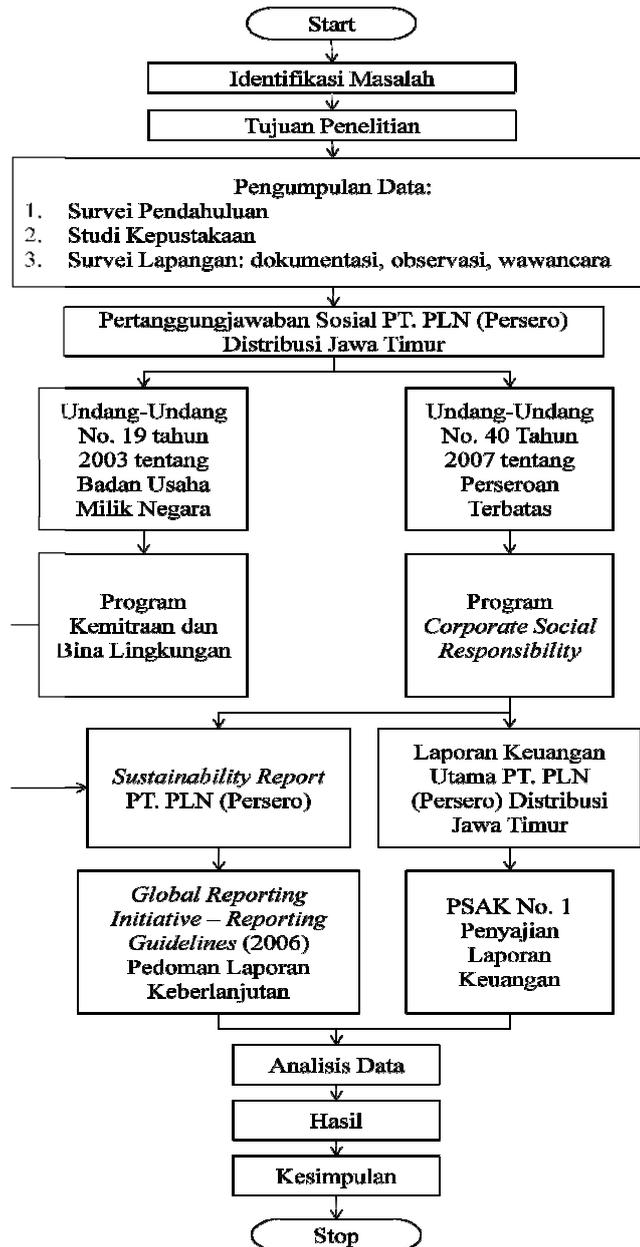
3.6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang dikumpulkan melalui proses observasi di obyek penelitian yang kemudian akan dianalisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur yang meliputi

analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporannya. Hasil analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, standar akuntansi untuk penyajian laporan keuangan PSAK No. 1 (Revisi 2009) dan pedoman laporan keberlanjutan, *GRI-Reporting Guidelines* (2006).

3.7. Bagan Penelitian

Adapun kerangka pemecahan masalah penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor: Ment. 16/I/20 tanggal 20 Mei 1961 diantaranya disebutkan di daerah-daerah, dibentuk daerah Eksploitasi yang terdiri dari 10 Daerah Eksploitasi Listrik Umum (Pembangkit dan Distribusi) dimana untuk Wilayah Jawa Timur adalah Eksploitasi IX yang melaksanakan fungsi pembangkitan dan pendistribusian tenaga listrik.

Pada tanggal 23 Oktober 1973, berdasarkan Keputusan Direksi PLN Nomor 054/DIR/73 nama PLN Eksploitasi diubah menjadi PLN Distribusi I/Pembangkitan I, dan kemudian pada tanggal 25 Februari 1976 diubah menjadi PLN Wilayah XII berdasarkan Keputusan Direksi PLN. Nomor 012/DIR/1976.

Selanjutnya sejak tanggal 3 Juli 1982 dengan Keputusan Direksi Nomor 042/DIR/1982 nama PLN Wilayah XII diubah lagi menjadi PLN Distribusi Jawa Timur, dengan tugas dan tanggung jawab mengelola pendistribusian tenaga listrik di Jawa Timur sampai dengan saat ini.

4.1.2. Profil Perusahaan

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sendiri berlokasi di Jl. Embong Trengguli No. 19-21 Surabaya. Wilayah usaha PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dibagi menjadi beberapa daerah Pelayanan yang melayani wilayah administrasi propinsi Jawa Timur (www.pln.co.id/disjatim/).

1. Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Selatan
2. Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Utara

3. Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Barat

(Ketiga Area pelayanan tersebut di atas melayani Kota Surabaya)

4. Area Pelayanan dan Jaringan Malang melayani Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang.
5. Area Pelayanan dan Jaringan Pasuruan melayani Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.
6. Area Pelayanan dan Jaringan Kediri melayani Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.
7. Area Pelayanan dan Jaringan Mojokerto melayani Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Mojokerto.
8. Area Pelayanan dan Jaringan Madiun melayani Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun.
9. Area Pelayanan dan Jaringan Jember melayani Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.
10. Area Pelayanan dan Jaringan Bojonegoro melayani Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Tuban.
11. Area Pelayanan dan Jaringan Banyuwangi melayani Kabupaten Banyuwangi.
12. Area Pelayanan dan Jaringan Pamekasan melayani Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Bangkalan.
13. Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo melayani Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.
14. Area Pelayanan dan Jaringan Gresik melayani Kabupaten Gresik sampai Kecamatan Bawean.
15. Area Pelayanan dan Jaringan Sidoarjo melayani Kabupaten Sidoarjo.
16. Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo melayani Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Pacitan.

4.1.3. Peran dan Tujuan Perusahaan

Seperti halnya perusahaan pada umumnya tentu memiliki tujuan, demikian pula PT.PLN (Persero) Ditsribusi Jawa Timur memiliki peran dan tujuan sebagai berikut (pln-jatim.co.id) :

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus akumulasi profit berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
 - b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan.
3. Merintis kegiatan usaha menyediakan tenaga listrik.
4. Menyelenggarakan usaha usaha lain yang menunjang penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4.1.4. Visi dan Misi Perusahaan

Dalam rangka pengembangan perusahaan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur memiliki visi dan misi, yakni (pln-jatim.co.id):

Visi

Pada tahun 2012 diakui sebagai unit distribusi dengan pelayanan kelas dunia dan mengutamakan kepuasan pelanggan serta mengedepankan budaya integritas.

Misi

1. Memberikan pelayanan yang transparan kepada pelanggan dengan cepat, tepat tuntas dan berintegritas.
2. Selalu melakukan perbaikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

4.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

4.2.1. Identifikasi Aktivitas Sosial Perusahaan

Program CSR yang dilakukan PT. PLN berlandaskan misi perusahaan yang berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan (*Sustainability Report 2011 PT. PLN Persero*). Hal ini mencerminkan diterapkannya prinsip *triple bottom line* yang menyelaraskan pengembangan ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

PT. PLN bisa dikatakan melakukan investasi sosial melalui hubungannya dengan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa dan lain-lain.

Dalam *Sustainability Report 2011 PT. PLN (Persero)* disebutkan tujuan kegiatan CSR yang dilakukan PT. PLN antara lain:

1. Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat
2. Mendorong timbulnya profesionalisme pengelolaan usaha kecil dan koperasi agar semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing
3. Membina usaha kecil dan koperasi berdasarkan pendekatan aspek pemerataan, kemandirian, profesional dan etika
4. Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum serta pemberian bantuan sosial.

Berikut merupakan visi dan misi dari program CSR PT. PLN dalam *Sustainability Report 2011* :

Visi :

Terwujudnya keharmonisan hubungan PT. PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga menunjang keberhasilan kegiatan PT. PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.

Misi :

1. Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan
2. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan Program Community Empowering.
3. Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan
4. Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk industri rumah tangga dan pengembangan desa mandiri energi.
5. Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

Dalam *Sustainability Report 2011* PT. PLN Persero juga disebutkan dasar hukum pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. PLN (Persero) adalah :

1. Keputusan Direksi No. 366.K/SK.DIR/2007 tentang SOP PKBL PT. PLN (Persero)
2. Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

3. Undang-Undang No. 40 th 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 tentang tanggung jawab sosial bagi perusahaan.

PLN bertekad menyelaraskan pengembangan ketiga aspek dalam penyediaan listrik, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengembangan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wujud nyata dari tanggungjawab sosial PLN. Wewenang dan tanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT PLN (Persero), mencakup di antaranya:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan *Community Relation, Community Services, Community Empowering* dan Pelestarian Alam.
2. Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan.
3. Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM serta peningkatan citra perusahaan.
4. Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Berikut merupakan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT PLN (Persero) dalam *Sustainability Report 2011*:

1. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- a. *Community Relation*

Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait.

- b. *Community Services*

Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum.

c. Community Empowering

Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

2. Program Desa Mandiri Energi

a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

PLTMH dibangun di areal yang relatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan listrik secara ekonomis, namun memiliki potensi sumber air yang potensial dan luas hutan yang memadai untuk menjamin pasokan air. Untuk memberi manfaat penerangan sekaligus mendorong masyarakat setempat memelihara kelestarian lingkungan, PLN membantu pembangunan PLTMH bekerja sama dengan perguruan tinggi.

b. Pembangkit listrik biogas

Pembangkit biogas didirikan di daerah dengan kegiatan peternakan yang dominan. Pembangkit ini memanfaatkan kotoran ternak, biasanya sapi, sebagai bahan utama. Proses pembangkitan listrik dilakukan dengan memanfaatkan gas metan dari proses fermentasi kotoran ternak. Gas metan yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik atau dapat digunakan untuk memasak. Sisa fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk. PLN telah mendukung pengembangan komunitas berbasis optimalisasi biogas dan potensi lokal di Desa Bojong Sleman yang mandiri, bekerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).

c. Pendidikan dan penyuluhan

Selain kegiatan pembangunan prasarana yang berkaitan dengan energi, dalam Program CSR Desa Mandiri Energi PLN juga menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan memberi pengertian mengenai pengaruh listrik, jaringan transmisi dan distribusi listrik terhadap

lingkungan dan kesehatan masyarakat selain pelaksanaan program bantuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

d. Pelestarian alam, termasuk penghijauan

Penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang selama ini telah rutin dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 PLN telah menanam pohon sebanyak 126.705 pohon.

3. Program Pengembangan Masyarakat

a. Program Kemitraan (PK)

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN. Pelaksanaan PK umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra Binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi). Pelaksanaan PK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- ii. Melakukan survei penelitian lapangan atas permohonan bantuan dari calon Mitra Binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang layak dan sehat, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- iii. Melakukan pembinaan kemitraan berupa pendidikan dan pelatihan, pemasaran, bantuan modal kerja, memproses jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi pada Mitra Binaan, pencatatan dan pembukuan transaksi yang terkait;
- iv. Membuat laporan secara periodik (triwulan dan tahunan).

b. Program Bina Lingkungan (BL)

Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa

partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN.

4.2.2. Perlakuan Akuntansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT. PLN (Persero) dalam menerapkan tanggung jawab sosialnya memiliki dua landasan yaitu untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 telah ditetapkan bahwa Laporan Tahunan Perseroan sekurang-kurangnya harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan disebutkan pada Pasal 74, sebagai Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Selanjutnya berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ditentukan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Berdasarkan dua peraturan perundang-undangan tersebut tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) dibagi menjadi dua bentuk, yaitu program CSR (*corporate social responsibility*) itu sendiri dan PKBL (program kemitraan dan bina lingkungan). Ketentuan yang lebih rinci mengatur tentang PKBL diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-50/MBU2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan regulasi tersebut aktifitas tanggung jawab sosial PT. PLN (persero) dilaporkan atau terkandung dalam tiga bentuk laporan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
2. Laporan Keuangan Utama Perusahaan (*financial statement*)
3. Laporan Keberlanjutan Perusahaan (*sustainability report*)

4.2.2.1. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini disusun terpisah dari laporan keuangan utama perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam penyusunan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT PLN (Persero) menggunakan dasar Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Revisi tahun 2012. Penyusunan laporan keuangan tersebut menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (Revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Basis akuntansi yang digunakan adalah dasar akrual (*accrual basis*) sehingga aset, liabilitas, pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya. Jadi, pencatatan harus dilakukan ketika suatu transaksi terjadi walaupun penerimaan atau pengeluaran kas atau setara kas belum dilakukan oleh unit PKBL. Beban segera diakui dalam Laporan Aktivitas jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Dasar pengukuran yang digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar. Dalam biaya historis, aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperolehnya. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan

suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini dibuat tidak menjadi satu dengan laporan keuangan utama perusahaan. Hal ini dikarenakan program bina lingkungan tersebut merupakan kegiatan diluar operasional utama perusahaan dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Selain itu pelaporan yang terpisah bertujuan untuk menilai kinerja manajemen dalam pelaksanaan dan realisasi program yang ada.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) penyusunan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan digunakan beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Periodisitas (*Accounting Period*)

Prinsip ini menghendaki pembagian transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan dalam periode-periode pelaporan. Hal ini untuk memudahkan pengukuran kinerja unit PKBL.

2. Prinsip Konsistensi (*Consistency*)

Prinsip ini menuntut bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Hal ini akan berimplikasi bahwa perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan untuk pos atau transaksi yang sama di masa datang. Tetapi, hal ini tidak menghalangi Unit PKBL menerapkan perlakuan akuntansi yang berbeda selama sesuai dengan SAK dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan.

3. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Pengungkapan penuh menyaratkan bahwa Laporan Keuangan dirancang dan dibuat untuk menggambarkan secara wajar dan tidak menyesatkan atas peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi Unit PKBL untuk suatu periode sehingga laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Semua informasi dalam laporan

keuangan telah diungkapkan dengan lengkap dan benar serta tidak mengandung atau menghilangkan informasi material yang tidak benar.

4. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Prinsip ini menekankan bahwa Laporan Keuangan hendaknya menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja aktivitas, dan asur kas Unit PKBL.

4.2.2.2. Laporan Keuangan Utama Perusahaan

Berdasarkan hasil observasi komponen tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) diketahui terdapat dalam pos akun Beban ComDev (*Community Development*) pada Laporan Laba Rugi. Dari hasil wawancara dengan SPV (*supervisor*) Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, komponen ComDev merupakan program tanggung jawab PT PLN (persero) yang bernama Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT. PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga dalam tanggung jawab sosialnya mengacu pada dua hal yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sebagai Perseroan Terbatas, PT. PLN (Persero) dituntut untuk melakukan tanggung jawab sosial dengan mengelola biaya sosialnya serta menyajikan dan mengungkapkan hasil kegiatan sosialnya. Begitu pula halnya dengan posisi PT. PLN (Persero) sebagai BUMN dimana harus memenuhi regulasi untuk menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Sehingga bentuk perlakuan masing-masing tanggung jawab sosial tersebut berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan SPV (*supervisor*) Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diperoleh informasi bahwa untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dibuat Laporan Posisi Keuangan PKBL dan Laporan Aktivitas yang terpisah dari Laporan Posisi

Keuangan utama Perusahaan. Sedangkan untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sendiri tercantum pada Laporan Laba Rugi dalam Pos *Community Development* (ComDev). Selanjutnya akan dipaparkan mengenai *Community Development* tersebut.

SPV (*supervisor*) Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Bapak Mirza saat wawancara mengemukakan bahwa *Community Development* merupakan suatu pos beban dalam Laporan Laba Rugi PT. PLN yang menunjukkan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk Program Tanggung Jawab Sosialnya (CSR) di luar Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program CSR dalam pos beban ini disebut Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L). Telah dijelaskan bahwa program tanggung jawab PT. PLN terdiri dari *Community Services*, *Community Empowering*, *Community Relation* dan Pelestarian Alam. *Community Services* diklasifikasikan dalam bidang Kesehatan, Sarana dan Prasarana Umum serta Sarana Ibadah. Kemudian *Community Empowering* mencakup bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pengembangan Masyarakat serta Peningkatan Usaha. Selanjutnya adalah *Community Relation* yang berkenaan dengan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait.

Bapak Mirza (*supervisor* Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur) dalam wawancara menyebutkan Beban ComDev dalam Laporan Laba Rugi digolongkan pada Pos Beban Lain-Lain. Hal ini dikarenakan Program Tanggung Jawab Sosial merupakan program di luar operasional Perusahaan. Program Tanggung Jawab Sosial pada PT. PLN (Persero) dikelola oleh Kantor Distribusi masing-masing Propinsi yang membawahi area serta unit dibawahnya. Namun sejak 2011 pengelolaan dilakukan terpusat oleh PLN Pusat di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memicu kinerja masing-masing area dan unit untuk menyusun program sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas perseroan atau citra perseroan di mata masyarakat yang akan mampu mempermudah operasi perusahaan ke depannya.

Beban ComDev diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggung jawabnya antara lain adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan/pelatihan, bantuan pengembangan sarana umum dan bantuan sarana ibadah. Angka-angka yang terdapat dalam pos beban tersebut berasal dari Laporan Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L).

Berikut merupakan contoh implementasi program tanggung jawab sosial yang telah berjalan pada tahun 2011 di PT PLN (persero):

Tabel 4.1. Tabel Realisasi Penyaluran Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.

Sumber: Arsip Perusahaan

No	Kelompok/Jenis Kegiatan	Lokasi	Tujuan
1	Community Relation		
	Kesepahaman		
	1 Jalan Sehat LKMK Kaliasin	Surabaya	Menyehatkan masyarakat dan sebagai upaya untuk menjalin hubungan baik dengan warga sekitar Kantor PLN
	2 Liga SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar)	Surabaya	Menyehatkan anggota organisasi sekaligus membangun kesepahaman dengan awak media
	3 Majelis Dzikir SBY Nurussalam	Surabaya	Membangun kesehatan rohani dan membangun kesepahaman
	4 BUMN Peduli	Jawa Timur	Untuk meringankan beban masyarakat berkaitan meningkatnya harga sembako
5 Sosialisasi Tertib Lalulintas	Surabaya	Meningkatkan kesadaran berlalulintas masyarakat dan membangun relasi dengan Polri	
2	Community Service		
	Kesehatan		
	1 Peduli Gizi 5000 Balita	Pasuruan	Menyehatkan masyarakat dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2 Peduli Hepatitis	Surabaya	Menyehatkan masyarakat dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	

Tabel 4.1. Tabel Realisasi Penyaluran Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Lanjutan).

3	Pengobatan Gratis dan Imunisasi Hepatitis	Surabaya	Menyehatkan masyarakat dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4	Khitanan dan kunjungan ke pondok pesantren di Sangkapura	Gresik	meningkatkan kesehatan
5	The Power Of Lansia Kesehatan Pemkot Pasuruan	Pasuruan	meningkatkan kesehatan
Sarana dan Prasarana Umum			
1	Bedah rumah	Banyuwangi dan Jember	Membantu warga dalam hal penyediaan fasilitas tinggal yang memadai
2	KKN- Unair	Sidoarjo	Membantu mahasiswa dan masyarakat dalam membangun fasilitas umum
3	Tempat Sampah	Blitar	Meningkatkan kebersihan lingkungan
4	Balai RW Sanan wetan	Blitar	Mendukung kegiatan bersama warga
5	TPQ R Tilobin	Bojonegoro	Penyediaan Sarana dan prasarana
6	Madrasah Diniyah Alawiyah	Bojonegoro	Penyediaan Sarana dan prasarana
7	Pondok Pesantren Attoriyyah	Bojonegoro	Penyediaan Sarana dan prasarana
8	Pembkab. Lamongan	Lamongan	Penyediaan Sarana dan prasarana
9	Pos Kamling	Jember	Penyediaan fasilitas keamanan
10	YPP. Nurul Islam Ds. Antirogo	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan dan ibadah yang memadai
11	Yayasan Darul Aitam Jl. Letjend Suprpto 188 Jember	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
12	Yayasan Mabaul Ulum Jl. Letjend Suprpto 22 Jember	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
13	Tim Pelaksana Ramadhan Mubarak 1432H Masjid Jami' Al Baitul Amien	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
14	Yayasan Pendidikan Islam Fatahillah Jl. PB. Sudirman 9A SukoJember Jelbuk	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
15	Yayasan Ulul Albab Jl.Gajah Mada XII/54 Jember	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
16	Yayasan Panti Asuhan Cahaya Darululum Jl.Sukarno Hatta Jembatan Talang Babatan Kec Jenggawah	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai

Tabel 4.1. Tabel Realisasi Penyaluran Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur (Lanjutan).

	17	Yayasan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Tribungan Bercahaya Jl.Wirowongso Ajung Jember	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
	18	Yayasan Panti Asuhan Nur Iman Jl.Slamet Riyadi III/09 Patrang	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
	19	Yayasan Masjid Jami' Al Awwabin Ds. Kaliwining Kec. Rambipuji	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
	20	Panti Asuhan Yatim Budi Mulia	Jember	Membantu warga dalam penyediaan sarana pendidikan yang memadai
3	Community Empowering			
		Pendidikan dan Pelatihan		
	1	Economics Events	Surabaya	Meningkatkan forum akademik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
	2	GABSI	Surabaya	Membantu masyarakat dalam hal peningkatan prestasi olah raga
	3	CEO Forum	Surabaya	Meningkatkan forum akademik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
	4	Pengajian Rutin	Surabaya	Membantu warga dalam hal peningkatan keilmuan
	5	Rumah Pintar Jatim Park	Malang	Turut mencerdaskan bangsa melalui penyediaan sarana pendidikan yang memadai
	7	Seminar Kewirausahaan	Malang	Meningkatkan forum akademik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
	8	Forum Study Advokasi Unair	Surabaya	Meningkatkan forum akademik dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
		Pengembangan Masyarakat		
	1	Dermaga dan Pos Pantau Kawasan Mangrove	Surabaya	Meningkatkan pemberdayaan komunitas nelayan untuk memelihara lingkungan dan menciptakan peluang usaha baru
	2	Komunitas Seni Reog	Surabaya	Membantu komunitas seni turut melestarikan kebudayaan lokal
4	Pelestarian Alam			
	1	Bank Sampah Bina Mandiri	Surabaya	Meningkatkan partisipasi warga dalam memelihara kebersihan lingkungan.
	2	Bank Sampah Malang	Malang	Meningkatkan partisipasi warga dalam memelihara kebersihan lingkungan.
	3	Penanaman Mangrove	Surabaya	Meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga lingkungan.

4.2.2.3. Laporan Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Report*)

Selain informasi tanggung jawab sosial yang terdapat dalam laporan laba rugi sebagai pos beban ComDev, PT PLN (persero) juga menerbitkan *sustainability report*. Informasi tanggung jawab sosial ini disajikan terpisah dari laporan keuangan utama perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan regulasi sebagai perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Memang belum ada standar khusus yang mengatur bagaimana pelaporan tanggung jawab sosial bagi suatu perusahaan. Dalam PSAK No. 1 (Revisi 2009) pun hanya disebutkan bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari laporan keuangan utama. Oleh karenanya perlu adanya acuan atau pedoman yang mengatur bagaimana batasan-batasan pelaporan atau penyajian informasi kegiatan perusahaan lain selain informasi finansial, dalam hal ini adalah informasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya guna mengkomunikasikan informasi kegiatan perusahaan lain, dibentuklah Inisiatif Pelaporan Global/*Global Reporting Initiative (GRI)* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan kerangka dalam melaporkan keberlanjutan yang dapat digunakan oleh berbagai organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasi (*GRI 2006 – Reporting Guidelines*).

Bapak Mirza (*supervisor* Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur) dalam wawancara menjelaskan bahwa PT. PLN (Persero) sendiri melaporkan aktivitas tanggung jawab sosialnya secara moneter dalam laporan keuangan utama juga menyajikan dan mengungkapkan informasi tambahan terkait tanggung jawab sosialnya itu dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang sifatnya terpusat (dikelola PT. PLN Pusat di Jakarta).

Berikut merupakan isi dari Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 2011:

1. Laporan Direksi

Dalam laporan direksi ini diutarakan kesadaran PT. PLN (Persero) akan ketiga aspek pendukung operasinya yakni kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Disebutkan bahwa laporan keberlanjutan dibentuk guna memberikan gambaran yang transparan dan berimbang tentang ketiga aspek tersebut. Dijelaskan pula laporan keberlanjutan ini berpedoman atau mengacu pada standar pelaporan internasional mengikuti *Global Reporting Initiative* (GRI). Laporan keberlanjutan dibuat terpisah dari Laporan Tahunan agar pemegang saham dan pemangku kepentingan yang luas dapat menilai inisiatif dan kesungguhan perseroan dalam mencapai kinerja yang maksimal secara ekonomis, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial masyarakat.

2. Profil PT. PLN (Persero)

Pada bagian Profil Perusahaan ini dipaparkan bidang operasi perusahaan dimana PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit. Dikemukakan pula informasi mengenai sejarah perusahaan, kepemilikan saham perseroan yang merupakan BUMN sehingga seluruh saham perseroan dimiliki oleh Pemerintah dan tidak diperdagangkan di Pasar Saham Bursa Efek Indonesia. Kemudian disebutkan pula Skala Ekonomi perseroan, Visi, Misi, dan Moto Perseroan serta Strategi Umum Perusahaan dan seluruh informasi berkaitan dengan perkembangan usaha Perseroan hingga berbagai Penghargaan dan Sertifikasi yang diperoleh.

3. Tata Kelola Berkelanjutan (*Sustainability Governance*)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan / *Good Corporate Governance* (GCG) di PLN akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan. Pada bagian ini disebutkan tiga sasaran utama penerapan GCG di PLN yaitu:

- a. Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkualitas, peningkatan efisiensi operasional serta peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan.
- b. Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalkan risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan.
- c. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham serta kepuasan pemangku kepentingan karena meningkatnya nilai perusahaan.

Dijabarkan pula pedoman, struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan berkenaan dengan tugas, fungsi dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta Komite Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya dijelaskan pula Kebijakan Pokok Tata Kelola serta Kode Etik Perilaku dan Budaya Perusahaan.

4. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility Program*)

Pada bagian ini dipaparkan Maksud dan Tujuan dilaksanakannya program tanggung jawab sosial, Struktur Organisasi Pelaksana, Dasar Hukum Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial, serta Program dan Pelaksanaan Program. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya program tanggung jawab sosial terdiri dari Program CSR itu sendiri, serta Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Selanjutnya dipaparkan pula realisasi anggaran program tanggung jawab sosial dan terpadat pula penjabaran singkat mengenai kisah dari beberapa Mitra Binaan PLN.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*)

Beberapa informasi yang tercantum pada bagian ini antara lain adalah pandangan perusahaan terhadap sumber daya manusia sebagai mitra sekaligus aset yang akan mendukung jalannya operasional perusahaan secara berkelanjutan. Informasi lain yang juga disampaikan adalah terkait Hubungan Perusahaan dengan Pegawai, Kepatuhan pada Peraturan Perundangan bidang Kepegawaian, dimana hal ini terkait dengan hak pegawai, lingkungan dan waktu kerja, penetapan upah, penghargaan, pelatihan, serta pelanggaran disiplin. Selanjutnya mengenai Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Karir mulai dari proses rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja dan ksetaraan dalam jenjang karir.

6. Lingkungan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (*Occupational Environment, Safety and Health*)

Pada bagian ini informasi yang disajikan lebih kepada kegiatan-kegiatan utama di periode tersebut serta data mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di masing-masing Unit dan data pemberian penghargaan bagi unit-unit yang paling sedikit mengalami kecelakaan kerja.

7. Kinerja Ekonomi (*Economic Performance*)

Bagian ini memaparkan kinerja ekonomi perseroan dari sudut pandang keberhasilan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik penyediaan tenaga listrik serta peran perusahaan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional. Beberapa data yang disajikan terkait produk dan jasa perseroan serta prosentase bauran energi serta inovasi-inovasi yang diberikan demi menunjang peningkatan manajemen produk dan informasi lainnya terkait dengan pengendalian mutu layanan.

8. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (*Environmental Management and Protection*)

Pada intinya, bagian ini menjelaskan segala bentuk Kebijakan Lingkungan dan upaya Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan PLN. Hal ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati di wilayah kerja serta sebagai bentuk ketaatan perusahaan pada peraturan perundang-undangan dalam mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan dari setiap kegiatan.

Sebagaimana penjelasan di atas, dari sudut pandang isi laporan keberlanjutannya PT. PLN (Persero) telah memenuhi prinsip-prinsip pelaporan menurut GRI terkait standar pengungkapan yang terdiri dari Profil (*Profile*), Indikator Kinerja (*Performance Indicators*), dan Pendekatan Manajemen (*Management Approach*).

4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. PLN (Persero)

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perseroan yang juga merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga pada prakteknya, PT. PLN (Persero) harus menerapkan suatu program yang telah diatur dalam Peraturan Menteri No. 05/MBU/2007. Regulasi tersebut mengatur terkait tanggung jawab sosial BUMN di Indonesia yakni berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar

keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Oleh karena telah adanya regulasi tersebut, maka tentulah ada pedoman dalam penyusunan suatu laporan program yang berjalan. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa dasar yang digunakan oleh BUMN dalam penyusunan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menggunakan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Pedoman tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 (revisi 2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Komponen laporan keuangan yang ditetapkan dalam pedoman tersebut terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ditinjau dari sudut pandang standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk BUMN, yakni SAK ETAP dan PSAK 45, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian BUMN yang telah disebutkan dalam Peraturan Menteri No. 05/MBU/2007 yaitu tidak hanya untuk mengejar keuntungan. Sehingga telah tepat bila menggunakan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Dalam PSAK 45 (revisi 2011) telah disebutkan bahwa ruang lingkup penerapan PSAK 45 adalah oleh lembaga pemerintah, dan unit-unit sejenis lainnya, sehingga PT. PLN (Persero) dalam hal ini dilihat dari sudut pandang BUMN memanglah harus menggunakan standar ini.

Komponen laporan keuangan yang digunakan dalam pedoman tersebut berbasis pada PSAK 45 (revisi 2011) paragraf 9 sebagaimana disebutkan bahwa, *“Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca) pada*

akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan”.

Dalam sebuah presentasi di Riau, 15 Maret 2011, Dwi Martani selaku Ketua Departemen Akuntansi FEUI – Anggota Tim Implementasi IFRS menyebutkan bahwa SAK ETAP merupakan SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang berarti bahwa entitas tersebut tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Disebutkan pula bahwa suatu entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan salah satunya adalah jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Sebagai perseroan yang juga sebagai BUMN, PT. PLN (Persero) tidak melakukan hal tersebut, dikarenakan saham perseroan sepenuhnya milik pemerintah, sehingga PT. PLN (Persero) dalam hal ini digolongkan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik.

PT. PLN (Persero) tidak memiliki tanggung jawab yang signifikan atas laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan kepada publik. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini juga disusun terpisah dari Laporan Keuangan Utama Perusahaan. Memang PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyedia tenaga listrik yang berorientasi pada bisnis, dimana keuntungan didapat dari hasil penjualan tenaga listrik tersebut, namun entitas nirlaba yang dimaksud disini adalah PT. PLN (Persero) sebagai BUMN yang dituntut melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Oleh karena itu laporan Program tersebut dibuat terpisah dari laporan keuangan utama yang memang khusus untuk operasional perusahaan. Hal ini senada dengan pernyataan saudara Ahmad Fathurroji selaku *Junior Analyst* Akuntansi dan Keuangan PT. PLN (Persero) Area Jember yang mengatakan, *“Laporan PKBL dibuat terpisah dari laporan keuangan perusahaan, standar yang dipakai juga beda. Untuk PKBL dasarnya Peraturan*

Menteri menggunakan SAK ETAP dan PSAK 45 untuk entitas nirlaba, karena Program itu kan untuk BUMN, jadi dilihat dari sudut pandang PLN sebagai BUMN, bukan perseroan yang orientasinya bisnis. Sifat dari pertanggungjawabannya juga hanya sebatas pemenuhan regulasi, dimana membuktikan bahwa PLN sudah melaksanakan hal tersebut.” Sehingga jelaslah bahwa Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan suatu bentuk perwujudan dari kepatuhan PT. PLN (Persero) sebagai BUMN dalam menerapkan regulasi yang mengaturnya untuk melakukan tanggung jawab sosial.

Berikut ini akan disajikan komparasi atau perbandingan dari format pelaporan yang ditentukan dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan format pelaporan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Tidak ada perbedaan signifikan pada laporan posisi keuangan yang dibuat PT PLN (persero) dengan format laporan keuangan berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tersebut dikarenakan PT PLN memang mengacu pada pedoman akuntansi tersebut, sehingga perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) didasari oleh pedoman akuntansi tersebut.

1. Laporan Posisi Keuangan

FORMAT LAPORAN KEUANGAN		
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT/Perum XXX		
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Per 31 Desember 20XB dan 20XA		
(Dalam Satuan Rupiah)		
Catatan	20XB	20XA
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	XXX	XXX
Kas/Bank Yang Dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
Piutang Penyisihan Laba kepada BUMN Pembina	XXX	XXX
Piutang Kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur	XXX	XXX
Piutang Pinjaman Mitra Binaan-Bersih	XXX	XXX
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp ... Di tahun 20XB dan sebesar Rp... di tahun 20XA		
Piutang Lain-lain bersih	XXX	XXX
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp ... Di tahun 20XB dan sebesar Rp... di tahun 20XA		
Deposito Berjangka	XXX	XXX
Beban Dibayar Dimuka	XXX	XXX
Aset Tidak Lancar		
Aset Tetap Bersih	XXX	XXX
(setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp ... Di tahun 20XB dan sebesar Rp... di tahun 20XA		
Aset Lain-lain	XXX	XXX
JUMLAH ASET	XXX	XXX
LIABILITAS DAN ASET NETO		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Jangka Pendek	XXX	XXX
Beban Yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX
Utang Pajak	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada BUMN Pembina Lain	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
Kelebihan Pembayaran Angsuran	XXX	XXX
Angsuran Belum Teridentifikasi	XXX	XXX
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang Sewa Pembiayaan	XXX	XXX
Utang Jangka Panjang kepada BUMN Pembina Lain	XXX	XXX
Utang Lain-lain	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS	XXX	XXX
ASET NETO		
Aset Neto Tidak Terikat	XXX	XXX
Aset Neto Terikat	XXX	XXX
JUMLAH ASET NETO	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	XXX	XXX

Gambar 4.1: Format Laporan Posisi Keuangan PKBL

Sumber: Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan



PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN CAB KD
PER 31 DESEMBER 2012

URAIAN	31 Des 2012	31 Des 2011
ASET		
Aset Lancar		
1 Kas & Setara Kas	XXX	XXX
2 Kas Bank Yang Dibatasi Penggunaannya	XXX	XXX
3 Deposito	XXX	XXX
4 Piutang Mitra Binaan Bersih	XXX	XXX
5 Piutang Lain-lain	XXX	XXX
6 Beban dibayar dimuka	XXX	XXX
7 Pajak dibayar dimuka	XXX	XXX
8 Piutang Mitra Binaan Bersih	XXX	XXX
Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
Aset Tidak Lancar		
1 Aset Tetap Bersih	XXX	XXX
2 Aset Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah Aset Tidak Lancar	XXX	XXX
JUMLAH ASET	XXX	XXX
LIABILITAS DAN ASET NETTO		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
1 Kelebihan Pembayaran Angsuran	XXX	XXX
2 Angsuran Belum Teridentifikasi	XXX	XXX
Liabilitas Jangka Panjang		
1 Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS	XXX	XXX
ASET NETO		
1 Aset Neto Terikat	XXX	XXX
2 Aset Neto Tidak Terikat	XXX	XXX
JUMLAH ASET NETO	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	XXX	XXX

Gambar 4.2: Format Laporan Posisi Keuangan PKBL PT. PLN (Persero)

Sumber: SAP (*system application product*) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

2. Laporan Aktivitas

LAPORAN AKTIVITAS
Per 31 Desember 20XB dan 20XA
(Dalam Satuan Rupiah)

Catatan	20XB	20XA
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		
PENDAPATAN		
Alokasi Bagian laba dari BUMN Pembina	xxx	xxx
Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain	xxx	xxx
Penggantian Beban Operasional	xxx	xxx
Sumbangan	xxx	xxx
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	xxx	xxx
Pendapatan Bunga	xxx	xxx
Pendapatan Lain-lain	xxx	xxx
JUMLAH (1)	xxx	xxx
ALOKASI BUMN PEDULI DAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA		
Alokasi Dana BUMN Peduli	(xxx)	(xxx)
ANNT-Berakhir Pemenuhan Program	xxx	xxx
ANNT-Berakhir Waktu	xxx	xxx
JUMLAH (2)	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx
BEBAN		
Dana pembinaan Kemitraan	xxx	xxx
Penyaluran- Bina Lingkungan	xxx	xxx
Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Peduli	xxx	xxx
Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain	xxx	xxx
Beban Pembinaan	xxx	xxx
Beban Upah Tenaga Harian	xxx	xxx
Beban Administrasi dan Umum	xxx	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx	xxx
Beban Sewa	xxx	xxx
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	xxx	xxx
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	xxx	xxx
Beban dan Pengeluaran Lainnya	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN (4)	xxx	xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT	xxx	xxx

Gambar 4.3.1: Format Laporan Aktivitas PKBL

Sumber: Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

LAPORAN AKTIVITAS
Per 31 Desember 20XB dan 20XA
(Dalam Satuan Rupiah)

Catatan	20XB	20XA
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER		
ANTT- Penyisihan BUMN Peduli	xxx	xxx
ANTT- Terbebaskan	(xxx)	(xxx)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT TEMPORER (6)	xxx	xxx
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN		
Sumbangan Terikat	xxx	xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO PERMANEN (7)	xxx	xxx
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO (8)=(5)+(6)+(7)	xxx	xxx
ASET NETO AWAL TAHUN (9)	xxx	xxx
ASET NETO AKHIR TAHUN (10)=(8)+(9)	xxx	xxx
catatan:		
ANTT = Aset Neto Terikat Temporer		

Gambar 4.3.2: Format Laporan Aktivitas PKBL

Sumber: Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan



PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
LAPORAN AKTIVITAS CAB KD
PER 31 DESEMBER 2012

URAIAN	Bin Des 2012	SD Des 2012	31 Des 2012
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENERIMAAN			
1 Droping Pusat PK	XXX	XXX	XXX
2 Droping Pusat BL	XXX	XXX	XXX
3 Droping KD/Wil	XXX	XXX	XXX
JUMLAH 1	XXX	XXX	XXX
PENDAPATAN			
1 Jasa Administrasi Pinjaman	XXX	XXX	XXX
2 Pendapatan Bunga	XXX	XXX	XXX
3 Pendapatan Lain-lain	XXX	XXX	XXX
JUMLAH 2	XXX	XXX	XXX
ALOKASI BUMN PEDULI DAN ASET NETO YANG BERAKHIR PEMBATASANNYA			
1 Alokasi Dana BUMN Peduli	XXX	XXX	XXX
2 ANTT Berakhir Pemenuhan Program	XXX	XXX	XXX
3 ANTT Berakhir Waktu	XXX	XXX	XXX
JUMLAH 3	XXX	XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX
BEBAN			
1 Dana Pembinaan Kemitraan	XXX	XXX	XXX
2 Dana Bina Lingkungan	XXX	XXX	XXX
3 Beban Administrasi dan Umum	XXX	XXX	XXX
4 Beban Penyusutan Aktiva Tetap	XXX	XXX	XXX
5 Beban Penyisihan Piutang	XXX	XXX	XXX
6 Transfer ke KD/Wil	XXX	XXX	XXX
7 Transfer ke Pusat	XXX	XXX	XXX
JUMLAH BEBAN	XXX	XXX	XXX
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT	XXX	XXX	XXX
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER			
1 ANTT Terbebaskan	XXX	XXX	XXX
2 ANTT Penyisihan BUMN Peduli	XXX	XXX	XXX
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT TEMPORER	XXX	XXX	XXX
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN			
1 Sumbangan Terikat	XXX	XXX	XXX
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT PERMANEN	XXX	XXX	XXX
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO	XXX	XXX	XXX
ASET NETO AWAL TAHUN	XXX	XXX	XXX
ASET NETO AKHIR TAHUN	XXX	XXX	XXX

Gambar 4.4: Format Laporan Aktivitas PKBL PT. PLN (Persero)

Sumber: SAP (*system application product*) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

4.3.2. Laporan Keuangan PT. PLN (Persero)

Sebelumnya PT. PLN (Persero) dinilai dari sudut pandang sebagai BUMN, dimana dituntut memenuhi regulasi yang ada untuk melakukan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang harus dilakukan pun telah memiliki ketentuan tersendiri yakni melalui program yang bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan serta telah diatur pula pedoman penyusunan laporannya. Selanjutnya pada bagian ini kita memandang PT. PLN (Persero) sebagai sebuah perseroan, dimana juga memiliki kewajiban melakukan tanggung jawab sosial sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam laporan keuangan utama PT. PLN (Persero) memang tidak ada laporan tambahan yang khusus berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan tidak ada pula penjabaran serta penjelasan khusus terkait tanggung jawab sosial pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Periode 2011 hanya disebutkan seberapa besar alokasi dana yang dikeluarkan atas keputusan direksi, sebagai berikut:

47. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - BERSIH	2011	2010	47. OTHERS INCOME (EXPENSES) – NET
Penghasilan denda administrasi	1.088.502	744.752	Administrative penalty income
Bagian laba bersih entitas asosiasi	123.519	123.314	Equity in net income of associates
Penghasilan jasa dan klaim	434.931	188.805	Claim and service income
Premi penerangan jalan umum	1.110	41.588	Fees for street lights
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi (Catatan 10)	34.345	72.499	Gain on sale of assets not used in operations (Note 10)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(70.000)	-	Environmental Partnership Program and Community Development
Beban penelitian	(1.944)	(1.055)	Research
Program pemberdayaan lingkungan	(37.273)	(47.852)	Community development programs
Kerugian penurunan nilai aset tetap (Catatan 10)	(394.436)	(330.107)	Loss on impairment of property, plant and equipment (Note 10)
Lain-lain	650.492	368.718	Others
Jumlah	<u>1.827.246</u>	<u>1.158.741</u>	Total

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2011, disetujui alokasi dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar Rp 70.000 juta.

Based on the Annual General Stockholder's Meeting dated June 27, 2011, the approved allocation of funds for Environmental Partnership Program and Community Development amounted to Rp 70,000 million.

Gambar 4.5: Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 - CALK PT. PLN (Persero)

Sumber: Situs PT. PLN (Persero) – www.pln.co.id

Laporan keuangan perseroan yang disusun lengkap beserta CALK dilakukan oleh PLN Pusat. PLN Unit dan Area hanya menyusun *summary* dari laporan keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Fathurroji selaku *Junior Analyst* Akuntansi dan Keuangan PT. PLN (Persero) Area Jember bahwa Kantor Unit dan Area serta Kantor Distribusi PT. PLN (Persero) hanya menyusun *summary* dari laporan keuangan kantornya. Selanjutnya dikirim ke kantor tingkat di atasnya untuk diperiksa, kemudian diberikan ke Pusat untuk disusun laporan keuangan konsolidasiannya. Sehingga format laporan keuangan lengkap beserta CALK disusun oleh PLN Pusat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa informasi yang mampu menunjukkan telah dilakukannya tanggung jawab sosial oleh PT. PLN (Persero) dalam Laporan Keuangan Utama Perusahaan dapat kita lihat pada Laporan Laba-Rugi Perusahaan. Dalam Laporan tersebut terdapat sebuah pos atau akun yang bernama ComDev (*Community Development*). Akun ComDev ini merupakan akun atas beban yang dikeluarkan perseroan atas tanggung jawab sosialnya. Sebelumnya dibahas bahwa sebagai BUMN PT. PLN (Persero) melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sedangkan pada bagian ini, program tanggung jawab sosial yang informasi bebannya tercatat dalam akun Beban ComDev ini bernama Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L). Beban ComDev ini diklasifikasikan ke dalam Beban Lain-lain, karena dianggap beban diluar operasional.

Berikut merupakan penampakan Beban ComDev dalam Laporan Laba-Rugi PT. PLN (Persero):

Distribusi Jawa Timur Surabaya
 PLN Financial Statement Version2 for BI
 Time 12:06:38 Date 07.02.2013
 RFBILA00/88093814 Page 1
 Company code 5100 Business area ****
 Amounts in IDR

C F	Comp code	Bus. Area	Texts	Reporting period (01.2012-12.2012)	Comparison period (01.2011-16.2011)	Absolute difference	Rel dif	Sumtn Level
			LABA RUGI					
			Pendapatan (beban) lain-lain					
			Beban lain-lain ()					
	5100		6208000300 Bantuan Korban Bencana Alam (ComDev)	xxx	xxx	xxx		
	5100		6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	xxx	xxx	xxx		
	5100		6208000500 Bantuan Peningkatan Kesehatan (ComDev)	xxx	xxx	xxx		
	5100		6208000600 Bantuan Pengeb. Pra/sarana Umum (ComDev)	xxx	xxx	xxx		
	5100		6208000700 Bantuan Sarana Ibadah (ComDev)	xxx	xxx	xxx		
	5100		6208000800 Beban Administrasi (ComDev)	xxx	xxx	xxx		
			Total Beban lain-lain ()	xxx	xxx	xxx		
			Total Pendapatan (beban) lain-lain	xxx	xxx	xxx		
			TOTAL LABA RUGI	xxx	xxx	xxx		

Gambar 4.6: Beban Comdev PT. PLN (Persero)

Sumber: SAP (*system application product*) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa kelompok beban ComDev diklasifikasikan sesuai program tanggung jawab sosial yang dilakukan, yakni Bantuan Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan, Bantuan Peningkatan Kesehatan, Bantuan Pengembangan Sarana-Prasarana Umum dan Bantuan Sarana Ibadah. Sebelumnya telah disebutkan bahwa program tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) dibagi menjadi *Community Services*, *Community Empowering*, *Community Relation* dan Pelestarian Alam. Dalam data diatas memang tidak terlihat pengklasifikasian tanggung jawab sosial tersebut, karena hanya dikelompokkan menurut bentuk programnya.

Namun pengelompokkan Program tanggung jawab sosial tersebut dapat kita lihat pada Laporan Realisasi Anggaran Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dibawah ini:



PT. PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT KANTOR DISTRIBUSI

REALISASI PROGRAM PARTISIPASI PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN
TAHUN 2011

NO	UNIT/AREA	Korban Bencana Alam	Peningkatan Kesehatan	Pengembangan Sarana Umum	Sarana Ibadah	Pendidikan dan Pelatihan		PELESTARIAN ALAM	BIAYA OPERASIONAL	JUMLAH
						COMMUNITY EMPOWERING	COMMUNITY RELATION			
		COMMUNITY SERVICES								
1	KANTOR DISTRIBUSI									-
2	SURABAYA SELATAN									-
3	SURABAYA UTARA									-
4	SURABAYA BARAT									-
5	GRESIK									-
6	SIDOARJO									-
7	MOJOKERTO									-
8	KEDIRI									-
9	MADIUN									-
10	PONOROGO									-
11	BOJONEGORO									-
12	MALANG									-
13	PASURUAN									-
14	SITUBONDO									-
15	JEMBER									-
16	BANYUWANGI									-
17	PAMEKASAN									-
18	APD JAWA TIMUR									-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gambar 4.7: Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Sumber: Arsip PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Dari data di atas barulah dapat dilihat pengklasifikasian secara jelas dari masing-masing program tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero). Berdasarkan data tersebut *Community Services* terdiri dari bantuan korban bencana alam, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana umum dan sarana ibadah, sedangkan pendidikan dan pelatihan tergolong dalam *Community Empowering* dan *Community Relation*.

Sebagai perseroan PT. PLN (Persero) memanglah *profit oriented* dalam arti bergerak di bidang bisnis penyedia tenaga listrik dengan harapan laba dari hasil penjualan tenaga listrik. Namun untuk penyisihan biaya sosialnya ini PLN berbeda dengan perseroan lain yang pada umumnya mengalokasikan sejumlah biaya sosial

tertentu untuk memperoleh legitimasi. Seperti halnya pada penelitian Sujono dan Winartie (2004) yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja menerapkan akuntansi sosial untuk mengurangi sentimen negatif dari masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam mengukur biaya. Karena masalah yang banyak timbul adalah bagaimana mengukur *social cost* dan *social benefit* yang diperoleh (Luhglatno, 2007). Namun yang membedakan PLN dengan perseroan lainnya adalah, PLN juga sebagai BUMN sehingga kepemilikan saham perseroan dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya dalam menentukan besarnya dana yang dikeluarkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan diambil dari laba usaha perseroan. Sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap laba usaha.

Tujuan dilakukannya tanggung jawab sosial oleh PT. PLN (Persero) juga hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi dan bentuk kepedulian kepada masyarakat. Seperti pernyataan SPV (*supervisor*) Kemitraan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Bapak Mirza saat wawancara yang menyebutkan, "*Program CSR PLN itu ada dua, PKBL dan P3L. PKBL itu untuk memenuhi regulasi dimana PLN dari sudut pandang BUMN. Sedangkan P3L itu bentuk program CSR milik PLN dari sudut pandang sebagai Perseroan. Untuk Laporan PKBL dibuat menggunakan dasar SAK ETAP dan PSAK 45 tentang Entitas Nirlaba. Jadi laporan keuangannya khusus dibuat terpisah dari laporan keuangan perseroan. Informasi di dalamnya juga hanya untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah. Berbeda dengan program P3L, bagian KHA (Komunikasi, Hukum dan Administrasi) sebagai pihak operasional mengajukan program pada Pusat, setelah disetujui dan dana turun, kita yang melaksanakan kemudian menyusun laporan realisasi program. Selanjutnya laporan tersebut kami serahkan pada bagian Keuangan dan Akuntansi untuk diposting di laporan keuangan. Walaupun standar yang digunakan berbeda, namun tetap untuk program ini bukan untuk mencari laba. Besarnya dana yang dikeluarkan itu tidak berpengaruh pada laba, karena dana dialokasikan dari laba. Prosentase besarnya alokasi tidak ditetapkan dengan pasti,*

tergantung program yang disetujui dari berbagai Unit. Maka dari itu dalam laporan keuangan posisinya sebagai beban lain-lain, karena dianggap sudah tidak memiliki manfaat dan berada diluar operasi peseroan.”

4.3.3. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) PT. PLN (Persero)

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam PSAK No.1 telah mengatur bahwa suatu entitas dapat pula menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari laporan keuangan utama. Oleh karena itu apabila diperlukan, adanya aktivitas lain, suatu perusahaan dapat membuat laporan lain mengenai kegiatan tersebut di luar laporan keuangan utamanya. Begitu pula untuk program tanggung jawab sosial, dapat disajikan dalam suatu laporan di luar laporan keuangan utama seperti Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

PT. PLN (Persero) juga telah membuat dan menerbitkan *Sustainability Report* tersebut. Namun laporan tersebut tidak disusun oleh tiap-tiap unit atau kantor area. Penyusunan *Sustainability Report* PT. PLN (Persero) tahun 2011 dilakukan secara terpusat. Dasar penyusunan yang digunakan adalah GRI (*Global Reporting Initiative*) – G 3.0.

Berikut hasil analisis laporan keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 2011 dengan membandingkan pada indikator Standar Pengungkapan GRI sebagai berikut:

1. Profile

a. Strategy and Analysis (strategi dan analisis)

Informasi ini telah tercantum dalam laporan keberlanjutan PT. PLN (Persero) pada bagian Profil PT. PLN (Persero) - Strategi Umum Perusahaan. Disebutkan bahwa keberlanjutan usaha perusahaan bergantung pada tiga pilar utama: kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Kinerja ekonomi yang stabil menjamin keberlanjutan usaha dalam menyediakan investasi. Kinerja lingkungan akan memastikan seluruh aktivitas operasional

mengurangi bahkan meniadakan kerusakan lingkungan. Sedangkan kinerja sosial menunjukkan pertanggungjawaban sosial perseroan dalam memastikan seluruh aktivitas perseroan selain meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberi manfaat bagi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan bahwa ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan yang perlu dicapai oleh perseroan untuk memastikan keberlanjutan usaha perseroan selama mungkin.

Dalam *sustainability report* juga dipaparkan dampak, risiko dan peluang usaha. Dikatakan bahwa dampak utama yang paling nyata bagi perseroan adalah perubahan iklim ekstrem. Cuaca yang memburuk seperti hujan lebat disertai angin topan dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan transmisi dan distribusi, yang mengakibatkan terganggunya pasokan listrik ke konsumen. Pengoperasian pembangkit PLN juga memberi dampak langsung maupun tidak langsung pada masyarakat, sebagai contoh radiasi elektromagnetik, limbah padat, debu, pencemaran air dan suara bising. Menghadapi kondisi ini, perseroan telah berkomitmen untuk mengelola semua dampak lingkungan bagi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

b. *Organizational Profile* (profil organisasi)

Dalam laporan keberlanjutan PT. PLN (Persero) telah disebutkan beberapa informasi Profil Perusahaan, mulai dari Nama Organisasi, Merek/Produk/Jasa Utama, Struktur Organisasi, Lokasi Kantor Pusat, Sifat Kepemilikan dan Bentuk Legal, Skala Organisasi, dan informasi lainnya yang relevan.

Berikut merupakan informasi dalam *sustainability report* yang berkenaan dengan indikator ini; kantor pusat PT. PLN (persero) berlokasi di Jl. Trunojoyo Blok M-I no. 135 Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit yang bertenaga air, diesel, tenaga uap berbahan bakar batu bara maupun gas, ke pengguna akhir seperti kawasan industri, komersial, pemukiman maupun sarana publik.

Perseroan merupakan BUMN dengan badan hukum berbentuk persero, bersifat terbuka, namun sahamnya tidak terdaftar dan tidak diperdagangkan di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham perseroan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

PLN beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan dukungan sekitar 47.615 pekerja pada tahun 2011. Selain menyalurkan kebutuhan listrik di wilayah Indonesia, PLN secara terbatas juga melakukan pembelian maupun penyaluran tenaga listrik dengan negara tetangga yang berbatasan, seperti Malaysia.

c. *Report Parameters* (parameter laporan)

Parameter pelaporan dalam hal ini terdapat tiga parameter yaitu periode pelaporan, tanggal pelaporan sebelumnya yang paling baru, dan siklus pelaporan. Semua informasi ini telah tercantum pada bagian Tentang Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero).

Disebutkan bahwa Laporan Keberlanjutan ini meski dibuat terpisah namun tidak dapat dipisahkan dari laporan kinerja perusahaan selama satu tahun operasional yang disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan PT PLN (Persero). Sebelumnya, laporan ini juga pernah dibuat terpisah pada Mei 2008 dan Juni 2011. Untuk menggambarkan keberhasilan seluruh program, pengukuran diambil melalui metode pengumpulan data terstandar. Untuk informasi keuangan PLN menggunakan metode pencatatan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku. Sementara informasi nonfinansial menggunakan ukuran-ukuran yang lazim dan metode pengumpulan informasi sesuai standar terakreditasi lain, seperti pada pengukuran informasi hasil pemantauan lingkungan, metode pencatatan kualitas dan kuantitas daya dan sebagainya. Laporan Keberlanjutan ini dibuat secara tahunan, meliputi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011.

d. *Governance, Commitments, and Engagement* (tata kelola, komitmen, dan keterlibatan)

Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite di bawah badan pengelola tertinggi yang bertanggung jawab untuk tugas khusus, seperti dalam menetapkan strategi atau mekanisme pengawasan organisasi telah dipaparkan secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan pada bagian Tata Kelola Berkelanjutan.

Dalam *sustainability report* dijelaskan Dalam struktur tata kelola perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi. RUPS merupakan forum para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan. RUPS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Melalui RUPST maupun RUPSLB, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi sekaligus memberikan pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan penting secara independen dan seimbang antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan perusahaan.

2. *Performance Indicators*

a. *Environmental* (Indikator Kinerja Lingkungan)

Aspek dalam indikator ini adalah Aspek Material, Aspek Energi, Aspek Air, Aspek Biodiversitas/keanekaragaman hayati, Aspek Emisi dan Limbah, Aspek Kepatuhan serta Aspek Pengangkutan/Transportasi. Aspek material terdiri dari penggunaan bahan yang diperinci berdasarkan berat atau volume dan prosentase penggunaan bahan daur ulang. Aspek Energi berkaitan dengan penggunaan energi baik langsung maupun tidak langsung dari sumber daya energi primer, penghematan dan inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi. Aspek Air terkait dengan pengelolaan penggunaan air per sumber serta pengaruh signifikan akibat penggunaan tersebut. Aspek Biodiversitas merupakan uraian atas dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa perusahaan. Aspek emisi terdiri dari uraian identitas, ukuran,

status proteksi emisi bahan kimia berdasarkan jenis dan berat serta nilai keanekaragaman hayati dan habitat yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan limbah. Kemudian Aspek Kepatuhan berkaitan dengan nilai yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan. Sedangkan Aspek Pengangkutan berkenaan dengan dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan. Semua aspek tersebut telah terperinci dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) pada bagian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.

Berikut merupakan contoh pemaparan berkenaan dengan inisiatif perusahaan untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai. Dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 2011 disebutkan bahwa untuk mengurangi konsumsi energi tak langsung (energi yang digunakan untuk kendaraan operasional), Perseroan juga melakukan langkah-langkah penghematan, baik melalui perawatan rutin kendaraan operasional maupun dengan penyediaan sarana perumahan pegawai di sekitar instalasi utama. Sementara Langkah maupun kebijakan yang ditempuh untuk menghemat pemakaian listrik mencakup:

1. Pemanfaatan bank kapasitor;
2. Sosialisasi dan implementasi ke karyawan untuk :
 - a. Menaikkan setting AC temperatur ke 25oC;
 - b. Mengurangi jumlah AC pada ruangan yang menggunakan AC *Over Capacity*;
 - c. Pemanfaatan cahaya alami:
 - i. Pengantian lampu-lampu listrik yang hemat energi dari lampu TL ke lampu SL secara bertahap;
 - ii. Penggantian AC (Biasa) ke AC *Split (Inverter dan Bio)*;
 - iii. Pembenahan kualitas kelistrikan.

b. *Product Responsibility* (Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk)

Informasi yang disajikan pada bagian ini meliputi program-program termasuk kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan atau memelihara akses terhadap listrik dan layanan kepada pelanggan serta pengawasan keterbukaan tentang informasi yang spesifik mengenai ketenagalistrikan. Dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) informasi tersebut disajikan pada bagian Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Kinerja Ekonomi.

Dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 2011 disebutkan bahwa sebagai bentuk tanggung jawab perseroan bagi keselamatan pelanggan dinyatakan bahwa untuk konsumen rumah tangga PLN memasang instalasi luar lengkap dengan pengatur embatas daya, tegangan standar yang ditentukan dan pengukur pemakaian daya. Pada setiap periode PLN melakukan kalibrasi ulang (terra) atas akurasi peralatan pengukur pemakaian daya untuk menjamin akurasi pencatatan. Pemasangan seluruh instrumen pengaman di instalasi akhir di tempat konsumen juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan konsumen. Perseroan juga mencantumkan petunjuk besaran tegangan listrik yang dialirkan dan peralatan yang mampu membatasi daya maksimum yang terpasang, sesuai kontrak pemasangan listrik yang ditanda-tangani kedua belah pihak. Sepanjang jalur transmisi dan distribusi serta arealareal gardu induk, gardu distribusi dan areal trafo, Perseroan memasang peringatan agar masyarakat luas dan konsumen berhati-hati dan menjaga jarak aman dengan areal dimaksud. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan jaringan maupun kesehatan konsumen dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat tersengat aliran listrik.

c. *Economic* (Indikator Kinerja Ekonomi)

Informasi yang tersaji pada bagian ini antara lain adalah perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasi, jasa karyawan, donasi dan lainnya. Informasi mengenai indikator

ekonomi ini dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN tersaji pada bagian Kinerja Ekonomi.

Disebutkan kinerja ekonomi PLN adalah sebagai berikut; pada tahun 2011, Perseroan dapat menghasilkan kenaikan pendapatan sebesar 128% menjadi Rp208 triliun dari sebelumnya Rp162 triliun. Total nilai perolehan ekonomi adalah sebesar Rp209 triliun atau naik 125% dari tahun sebelumnya Rp166 triliun. Perseroan dapat mendistribusikan kembali perolehan nilai ekonomi hingga mencapai Rp205.367 triliun kepada para pemangku kepentingan atau naik 61.8 % dari tahun 2010 sebelumnya. Bagian terbesar nilai perolehan Perseroan ini terpakai untuk biaya operasional yang mencapai Rp180 triliun, gaji pegawai Rp13 triliun, dan distribusi kepada penyandang dana (dividen untuk pemerintah dan bunga pinjaman bank) sebesar Rp11 triliun. Sisanya terpakai untuk membayar pajak, royalti, dan pengeluaran untuk masyarakat. Selisih antara nilai ekonomi yang diperoleh dan didistribusikan pada tahun 2011 mengalami penurunan cukup signifikan daripada tahun sebelumnya. Sehingga nilai ekonomi yang dapat ditahan untuk membiayai kegiatan Perseroan tahun berikutnya menjadi minus Rp3.781 miliar atau turun 61,85% dari periode sebelumnya (*Sustainability Report* PT. PLN Persero tahun 2011).

d. *Human Rights* (Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia)

Indikator ini meliputi jumlah waktu bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk presentase karyawan yang telah menjalani pelatihan. Selain itu juga segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. Semua informasi terkait telah disajikan pada bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Disebutkan bahwa PLN menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karirnya sesuai kompetensi dan

perkembangan perusahaan. Kompetensi dan kemampuan pegawai dinilai menurut *tools "balanced scorecard"* untuk menjamin akurasi dan kesetaraan. Penerapan yang konsisten atas asas ini menjadikan tidak adanya lagi kasus diskriminasi yang berkaitan dengan suku, ras, agama dan *gender* pada semua level jabatan di Perseroan. Pada tahun pelaporan, jumlah mitra kerja yang terlibat dalam interaksi dengan operasional Perseroan cukup besar bergantung pada besaran unit bisnis masing-masing dan kompleksitas pekerjaan. Hubungan Perseroan dengan para mitra berdasar pada azas profesionalisme, dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang mencakup standar mutu, sistem manajemen dan keselamatan kerja (SMK3), serta sistem manajemen lingkungan (SML). Azas profesionalisme mencakup juga pemenuhan ketentuan harga yang bersaing, kredibilitas, akuntabilitas, dan ketepatan atas pasokan barang maupun jasa dari para mitra kerja. Perseroan juga mensyaratkan dipenuhinya aspek-aspek HAM dalam pelaksanaan investasi pembangunan pembangkit, kerja sama maupun kegiatan pemasokan oleh para mitra kerja (*Sustainability Report* PT. PLN Persero tahun 2011).

e. *Labour Practice and Decent Work Performance Indicators* (Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak)

Pada bagian ini informasi yang disajikan berkaitan dengan tenaga kerja perusahaan mulai dari program dan proses untuk menjamin ketersediaan tenaga terampil, presentase jumlah tenaga kerja yang akan pensiun 5 dan 10 tahun mendatang, kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, jumlah dan tingkat perputaran karyawan, serta presentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur. Semua informasi tersebut telah tersaji di Laporan Keberlanjutan PT. PLN pada bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan LK3 (lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja).

Telah dinyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang terampil dalam proses perekrutan, PLN menyelenggarakan *Direct*

Shopping dan *Job Fair* yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang terbagi dalam 3 kelompok kegiatan rekrutmen yaitu: (i) rekrutmen S1/D4/D3 (ii) rekrutmen program D3 kerja sama (iii) rekrutmen operator PLTU. Selain itu, PLN juga menyelenggarakan program beasiswa ikatan dinas dan *daily online application*. Proses rekrutmen kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai baru maupun pegawai lama.

Batasan usia pensiun PT PLN (Persero) adalah 56 tahun. Sehingga dengan kondisi demografi pegawai seperti digambarkan tersebut di atas, jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan (usia >50 tahun) berjumlah 9.005 orang dan untuk 10 tahun ke depan (usia 46-50) berjumlah 9.631 orang. Dengan demikian total pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada 10 tahun ke depan berjumlah 18.636 orang atau 34,89% dari seluruh pegawai pada 2011 (*Sustainability Report* PT. PLN Persero tahun 2011).

f. *Society* (Indikator Kinerja Masyarakat)

Beberapa informasi terkait adalah mengenai keterbukaan terhadap masyarakat untuk sektor listrik dan utilitas, sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri. PT. PLN telah menyajikan informasi tersebut dalam Laporan Keberlanjutannya pada bagian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.

Dalam *Sustainability Report* PT. PLN Persero tahun 2011 disebutkan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dengan masyarakat pemilik tanah adat, PLN telah menyusun program pemberdayaan masyarakat adat (*community development action plan/CDAP*) yang berisi program-program pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial PLN (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Program CSR disusun berdasarkan hasil

konsultasi dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat adat di sekitar lokasi proyek PLTA Genyem. Program CSR tersebut antara lain pembangunan proyek air bersih dan penyambungan listrik. Sehingga tidak ada kasus perselisihan dengan penduduk asli menyangkut hak tanah selama periode pelaporan.

Berikut merupakan komparasi antara indikator yang terdapat dalam GRI dengan Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) tahun 2011:

Tabel 4.2. Komparasi Indikator GRI dengan *Sustainability Report* PT. PLN (Persero)

No.	Indikator (<i>Indicators</i>)	Dalam <i>Sustainability Report</i> PT. PLN (Persero) tahun 2011		
		Ada	Tidak	
1	Profil (<i>Profile</i>) Strategi dan Analisis (<i>Strategy and Analysis</i>)	a.1	✓	
		a.2	✓	
	b	Profil Organisasi (<i>Organizational Profile</i>)		
		b.1	✓	
		b.2	✓	
		b.3	✓	
	b.4	✓		

Tabel 4.2. Komparasi Indikator GRI dengan *Sustainability Report* PT. PLN (Persero) – (Lanjutan)

	b.5	Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di mana operasi utama dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan.	✓
	b.6	Sifat kepemilikan dan bentuk legal.	✓
	b.7	Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan geografi, sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat).	✓
	b.8	Skala organisasi.	✓
	b.9	Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan terkait ukuran, struktur dan kepemilikan.	✓
	b.10	Penghargaan yang diterima dalam periode laporan.	✓
c		Parameter Laporan (<i>Report Parameters</i>)	
	c.1	Periode pelaporan	✓
	c.2	Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada)	✓
	c.3	Siklus pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya)	✓
	c.4	Alamat kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya	✓
	c.5	Proses dalam menetapkan isi laporan	✓
	c.6	Batasan laporan	✓
	c.7	Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan	✓
	c.8	Dasar untuk melaporkan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas yang disewakan, kegiatan melalui <i>outsourcing</i> , serta entitas lainnya yang berpengaruh signifikan dan dapat diperbandingkan informasinya setiap saat/antar organisasi.	✓
	c.9	Teknik pengukuran data dan dasar penghitungannya	✓
	c.10	Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap informasi yang disediakan dalam laporan sebelumnya	✓
	c.11	Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya.	✓
d		Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan (<i>Governance, Commitments, and Engagement</i>)	
	d.1	Struktur tata kelola organisasi	✓

Tabel 4.2. Komparasi Indikator GRI dengan *Sustainability Report* PT. PLN (Persero) – (Lanjutan)

	d.2	Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola tertinggi.	✓
	d.3	Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif	✓
	d.4	Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan.	✓
	d.5	Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan pengelola tertinggi dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.	✓
	d.6	Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah laku, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari implementasinya.	✓
	d.7	Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi manajemen dan identifikasi organisasi terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko dan peluang yang relevan.	✓
	d.8	Proses dalam mengevaluasi kinerja	✓
	d.9	Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan/atau organisasi advokasi nasional/internasional.	✓
	d.10	Daftar kelompok <i>stakeholder</i> yang dilibatkan oleh organisasi	✓
	d.11	Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih <i>stakeholder</i> yang akan dilibatkan	✓
	d.12	Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan <i>stakeholder</i> , termasuk di dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompoknya.	✓
2		Indikator Kinerja (<i>Performance Indicators</i>)	
	a	Lingkungan (<i>Environmental</i>)	
	a.1	Aspek Material	✓
	a.2	Aspek Air	✓
	a.3	Aspek Biodiversitas	✓
	a.4	Aspek Emisi, Efluen dan Limbah	✓
	a.5	Aspek Produk dan Jasa	✓
	a.6	Aspek Pengangkutan/Transportasi	✓

Tabel 4.2. Komparasi Indikator GRI dengan *Sustainability Report* PT. PLN (Persero) – (Lanjutan)

	a.7	Aspek Kepatuhan	✓
b		Hak Asasi Manusia (Human Rights)	
	b.1	Aspek Investasi dan Pengadaan	✓
	b.2	Aspek Non Diskriminasi	✓
	b.3	Aspek Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	✓
	b.4	Aspek Pekerja Anak	✓
	b.5	Aspek Kerja Paksa dan Kerja Wajib	✓
	b.6	Aspek Praktek/Tindakan Pengamanan	✓
	b.7	Aspek Hak Penduduk Asli	✓
c		Praktik Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak (Labor Practices and Decent Work)	
	c.1	Aspek ketenagakerjaan khusus untuk bidang dan utilitas tertentu	✓
	c.2	Aspek tenaga kerja/hubungan manajemen	✓
	c.3	Aspek keselamatan dan kesehatan kerja	✓
	c.4	Aspek pelatihan dan pendidikan	✓
	c.5	Aspek keberagaman dan kesempatan setara	✓
d		Masyarakat (Society)	
	d.1	Aspek keterbukaan terhadap masyarakat	✓
	d.2	Aspek rencana tanggap darurat	✓
	d.3	Aspek komunitas	✓
	d.4	Aspek korupsi	✓
	d.5	Aspek kebijakan publik	✓
	d.6	Aspek kelakuan tidak bersaing	✓
	d.7	Aspek kepatuhan	✓
e		Tanggung Jawab Produk (Product Responsibility)	
	e.1	Aspek pengungkapan	✓
	e.2	Aspek kesehatan dan keselamatan pelanggan	✓
	e.3	Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa	✓
	e.4	Aspek komunikasi pemasaran	✓
	e.5	Aspek keleluasaan pribadi pelanggan	✓
	e.6	Aspek kepatuhan	✓

f	Ekonomi (<i>Economic</i>)	
f.1	Aspek kinerja ekonomi	✓
f.2	Aspek kehadiran pasar	✓
f.3	Aspek dampak ekonomi tidak langsung	✓
f.4	Aspek ketersediaan dan keandalan	✓
f.5	Aspek efisiensi sistem	✓

3. *Management Approach*

Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai pelaporan pertanggungjawaban sosial PT. PLN (Persero) terlebih dahulu kita mengingat kembali pembahasan pada tinjauan pustaka terkait kebijakan dalam menentukan batasan pengungkapan informasi dalam Laporan Keberlanjutan. Dalam GRI disebutkan bahwa ketika informasi yang diungkapkan tersebut memiliki kendali terhadap entitas dan memiliki dampak signifikan, maka informasi harus disajikan dan diungkapkan dalam bentuk Data Kinerja (*Performance Data*). Sedangkan ketika informasi yang diungkapkan hanya memiliki pengaruh dan dampak yang signifikan namun tidak memiliki kendali terhadap entitas, maka perusahaan cukup hanya mengungkapkan informasi dalam bentuk Pengungkapan Pendekatan Manajemen (*Disclosures on Management Approach*). Sedangkan ketika informasi yang diungkapkan hanya memiliki pengaruh namun tidak signifikan bagi entitas maka pengungkapan cukup sebatas pelaporan naratif terkait isu dan masalah yang relevan (*narrative reporting on issues and dilemmas*).

BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat dua bentuk program CSR yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, yaitu Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dalam *Sustainability Report* PT. PLN (Persero) disebutkan secara garis besar program tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) dibagi menjadi empat jenis program utama sebagai berikut:

- a. *Community Services*

Program ini terdiri dari program bantuan pada korban bencana alam, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan dan pembangunan sarana umum, serta bantuan sarana ibadah.

- b. *Community Empowering*

Program ini terdiri dari program pendidikan dan pelatihan.

- c. *Community Relation*

Sama halnya dengan *Community Empowering*, program ini terdiri dari program pendidikan dan pelatihan. Yang membedakan keduanya adalah, pada *Community Empowering* program dilaksanakan dengan tujuan memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandirian dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sedangkan pada *Community Relation* lebih bertujuan untuk menyelaraskan tujuan perusahaan dengan keinginan masyarakat dengan pengembangan kesepahaman melalui komunikasi seperti berbagai sosialisasi berkenaan dengan kegiatan atau produk PT. PLN (Persero).

- d. Pelestarian Alam

Program pelestarian alam ini dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia. Program ini juga berguna bagi masyarakat untuk mengembangkan pola pikir peduli terhadap lingkungannya.

2. Implementasi tanggung jawab sosial PT. PLN (Persero) bisa dikatakan sudah baik. PT. PLN (Persero) Jawa Timur mengelola Unit/Area Kantor Distribusi, Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Madiun, Ponorogo, Bojonegoro, Malang, Pasuruan, Situbondo, Jember, Banyuwangi, Pamekasan dan APD Jawa Timur. Beberapa program diantaranya adalah BUMN Peduli yang direalisasikan di area Jawa Timur dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat berkaitan meningkatnya harga sembako. Selanjutnya Program Peduli Gizi 5000 Balita yang dilakukan di Pasuruan dengan tujuan menyehatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Program Rumah Pintar Jatim Park yang dilaksanakan di Malang sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam mencerdaskan bangsa melalui penyediaan sarana pendidikan yang memadai. Selanjutnya adalah Bank Sampah Bina Mandiri yang dilaksanakan di Surabaya guna meningkatkan partisipasi warga dalam memelihara kebersihan lingkungan dan masih banyak lagi program tanggung jawab sosial lainnya.
3. Penerapan Akuntansi untuk program tanggung jawab sosial perusahaan dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Program yang terpisah dengan Laporan Keuangan Utama Perusahaan. Laporan disusun dengan basis akrual dan menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011). Hal ini karena pertanggungjawaban program hanya diperuntukkan bagi

pihak intern hanya sebatas penilaian kinerja pelaksana operasional dalam merealisasikan anggaran.

4. Sedangkan untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. PLN (Persero) yang berupa Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dimana sebagai bentuk kepatuhan perseroan dalam memenuhi UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Dilaksanakannya tanggung jawab sosial PT. PLN (persero) terlihat dari adanya pos Beban *Community Development* (ComDev) pada Laporan Laba-Rugi yang digolongkan pada bagian Beban Lain-lain. Diakui sebagai beban karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis ke depannya dan merupakan pengeluaran diluar operasi utama perusahaan, sehingga murni untuk program tanggung jawab sosialnya. Sumber dana program tanggung jawab sosial perusahaan berasal dari prosentase tertentu Laba Perusahaan. Penyaluran dana bersumber dari Usulan Program dari Unit PLN dan dari Eksternal (SOP No. CSR/01/2012).
5. Selain dilaporkan dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas yang terpisah dari Laporan Keuangan utama perusahaan serta tercantum sebagai Beban dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan, PT. PLN (Persero) juga mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya itu dalam sebuah Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan Keberlanjutan tersebut disusun oleh Kantor Pusat PT. PLN (Persero) di Jakarta. Laporan tersebut telah mengacu pada GRI dimana telah memenuhi semua indikator unsur pelaporan.
6. Apabila dilihat dari sudut pandang batasan pelaporan, informasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam Laporan Keberlanjutan PT. PLN (Persero) dilaporkan dalam bentuk narasi, karena memang tanggung jawab sosial tersebut tidak memiliki kendali terhadap perusahaan dan memang posisinya berada di luar operasional perusahaan, serta tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan karena tujuan PT. PLN (Persero) melaksanakan tanggung jawab sosialnya adalah untuk memenuhi regulasi yang ada, memperbaiki citra, mutu

dan produktivitas, mengurangi biaya risiko atas operasi perusahaan, menurunkan tekanan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Walaupun tidak memiliki pengaruh signifikan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berdampak jangka panjang signifikan diantaranya adalah dengan meningkatnya taraf hidup sebagai dampak bantuan dari perusahaan seiring dengan meningkatnya loyalitas dan kesepahaman masyarakat dengan proses operasi PT. PLN (Persero) akan meningkatkan penjualan tenaga listrik serta mengurangi tunggakan. Sehingga dalam jangka panjang akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan Batasan Pelaporan pada GRI ketika informasi yang diungkapkan tidak memiliki pengaruh dan dampak signifikan maka cukup disajikan dalam bentuk narasi.

5.2.Keterbatasan Penelitian

Dikarenakan oleh beberapa situasi dimana peneliti juga tidak luput dari kesalahan, tentunya penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Akuntansi Tanggung Jawab Sosial merupakan bidang ilmu yang relatif baru dibandingkan bidang ilmu akuntansi lainnya, sehingga dasar perlakuan akuntansi baku belum bisa dibentuk. Sehingga peneliti menggunakan dasar peraturan pemerintah yang berlaku serta standar pelaporan aktivitas diluar operasi yang sifatnya umum yang digunakan secara internasional, yakni *Global Reporting Initiative* (GRI).
2. Penelitian ini hanya dilakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur bukan di PT. PLN (Persero) Pusat di Jakarta. Sehingga tidak dapat memberikan gambaran dan deskripsi lebih jelas terkait kebijakan terkait keputusan atas penetapan dana tanggung jawab sosial dan pemilihan program tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial tidak dapat didasarkan pada satu disiplin ilmu saja, sehingga dibutuhkan disiplin ilmu lain sebagai penunjang seperti Ilmu Hukum, Hukum Lingkungan dan Ekonomi Lingkungan.
4. Biaya tanggung jawab sosial yang diterapkan oleh tiap-tiap perseroan dan BUMN tidak selalu sama tergantung jenis kegiatan industri, teknologi, dan kebijakan perusahaan.

5.3.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, serta keterbatasan dari penelitian ini maka peneliti mencoba memberi saran yang sekiranya bermanfaat yaitu:

1. Disarankan agar perusahaan tetap membuat laporan terpisah mengenai realisasi kegiatan agar lebih mudah mengevaluasi kegiatan atau program yang berjalan serta berguna untuk pertimbangan program yang akan dilaksanakan.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti di bidang tanggung jawab sosial pada obyek penelitian yang serupa, disarankan menggunakan PT. PLN (Persero) Pusat sebagai obyek penelitiannya agar memperoleh gambaran lebih jelas terkait kebijakan terkait.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti di bidang tanggung jawab sosial, disarankan lebih mengarah kepada implementasi dari tanggung jawab sosial dengan didukung disiplin ilmu lain baik segi hukum, hukum lingkungan maupun ekonomi lingkungan, agar penilaian terhadap implementasi yang berjalan bisa lebih baik. Misalnya apakah yang menjadi pertimbangan bagian Komunikasi, Hukum dan Administrasi (KHA) perusahaan dalam membuat program tanggung jawab sosial dari segi Hukum.
4. Dikarenakan belum ada standar baku yang mengatur pelaporan tanggung jawab sosial bagi perusahaan, disarankan untuk penelitian selanjutnya tetap menggunakan obyek perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas pertimbangan, sebagai BUMN tentu harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan pemerintah, yang menjadi berbeda hanya bagaimana kebijakan

perlakuan akuntansi untuk biaya sosial dari sudut pandang sebagai perseroan. Dimana hal tersebut tergantung dari jenis kegiatan industri, teknologi dan kebijakan perusahaan.

5. Selain alasan pada poin nomor empat (4) digunakannya obyek BUMN untuk penelitian selanjutnya karena BUMN cenderung perusahaan yang memberikan pelayanan publik serta merupakan perusahaan besar yang rentan terhadap sentimen negatif. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Anggraini (2006) bahwa perusahaan yang termasuk dalam industri yang memiliki risiko politis yang tinggi cenderung mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Retno, R. Agustus 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi 9. K-AKPM*, 24. Padang.
- CSR PT. PLN (Persero). <http://www.pln.co.id/?p=129>
- Chariri, A. dan Nugroho, A. November 2009. Retorika dalam Pelaporan *Corporate Social Responsibility*: Analisis Semiotik atas *Sustainability Reporting* PT Aneka Tambang Tbk. *Simposium Nasional Akuntansi XII*.
- Global Reporting Initiative*. 2006. *Sustainability Report Guidelines*.
- Handayati, P. dan Laksiani, T. 2008. Implementasi *Corporate Social Responsibility* sebagai Upaya Mengatasi Konflik Saluran Udara Ekstra Tinggi (SUTET) (Sdtudi Kasus pada PLN Kota Malang). *Jurnal Penelitian Kependidikan, Tahun 18, Nomor 1*.
- Hery. 2008. *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: LP-FEUI
- Hadi, Sofyan. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada PT. Istana Cipta Sembada Banyuwangi*, Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. (Edisi 1). Yogyakarta: BPFE.

- Luhglatno. 2007. Akuntansi Sosial Bentuk Kepedulian Perusahaan Terhadap Lingkungan (*Social Accounting is A Attention Corporate Model by Environment*). *Fokus Ekonomi*, 2(2): 1-16.
- Masnila, Nelly. 2006. *Corporate Social Responsibility: An Overview from Accounting Perspective*.
- PSAK 01. *Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009)*.
- PSAK 45. *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (Revisi 2010)*.
- SAK ETAP. *Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Revisi 2009)*.
- Sayekti, Y. dan Wondabio, Sensi, L. Juli 2007. Pengaruh CSR *Disclosure* Terhadap *Earning Response Coefficient*. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Struktur Organisasi Kementerian BUMN. <http://www.bumn.go.id>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wasrin, Rosalina. 2010. Paparan Kebijakan Kementerian BUMN. 2010. *Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Bandung.
- Winartie, H. dan Sujono. 2004. Penerapan Akuntansi Sosial Ekonomi Pada PT Pupuk Sriwidjaja: Suatu Penelitian Pendahuluan (*Preliminary Research*). *Fordema*, 4(1): 749-770.
- Yenfitia, A. dan Handayani, D. Desember 2008. Implementasi Program “*Corporate Social Responsibility*” (CSR) PT. Semen Padang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 3(2): 71-85.

Lampiran 1

Format Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

FORMAT LAPORAN KEUANGAN

Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT/Perum XXX

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 20XB dan 20XA

(Dalam Satuan Rupiah)

	Catatan	20XB	20XA
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas		xxx	xxx
Kas/Bank Yang Dibatasi Penggunaannya		xxx	xxx
Piutang Penyisihan Laba kepada BUMN Pembina		xxx	xxx
Piutang Kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur		xxx	xxx
Piutang Pinjaman Mitra Binaan-Bersih		xxx	xxx
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp Di tahun 20XB dan sebesar Rp... di tahun 20XA			
Piutang Lain-lain bersih		xxx	xxx
(Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp Di tahun 20XB dan sebesar Rp... di tahun 20XA			
Deposito Berjangka		xxx	xxx
Beban Dibayar Dimuka		xxx	xxx
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap Bersih		xxx	xxx
(setelah dikurangi penyusutan sebesar Rp Di tahun 20XB dan sebesar Rp... di tahun 20XA			
Aset Lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Jangka Pendek		xxx	xxx
Beban Yang Masih Harus Dibayar		xxx	xxx
Utang Pajak		xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada BUMN Pembina Lain		xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		xxx	xxx
Kelebihan Pembayaran Angsuran		xxx	xxx
Angsuran Belum Teridentifikasi		xxx	xxx
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Sewa Pembiayaan		xxx	xxx
Utang Jangka Panjang kepada BUMN Pembina Lain		xxx	xxx
Utang Lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat		xxx	xxx
Aset Neto Terikat		xxx	xxx
JUMLAH ASET NETO		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		xxx	xxx

Lampiran 2

Daftar Wawancara (Sumber: Hadi, Sofyan. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada PT Istana Cipta Sembada)

Daftar Wawancara

Pertanyaan diajukan kepada bagian KHA (Komunikasi, Hukum dan Administrasi):

1. Bagaimana proses operasi di PT. PLN (Persero)?
2. Dalam proses operasi perusahaan tersebut menimbulkan dampak sosial apa saja?
3. Tolong jelaskan proses penanggulangan dampak sosial tersebut?
4. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap keberadaan proyek operasi PT. PLN (Persero) yang berdampak terhadap lingkungan maupun sosial ?
5. Bagaimana selama ini perusahaan menerima dan menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat?
6. Apakah perusahaan ini telah menyajikan pelaporan terkait tanggung jawab sosialnya terhadap dampak sosial yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasi perusahaan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

Pertanyaan diajukan kepada bagian Keuangan dan Akuntansi :

1. Apakah perusahaan ini telah menyajikan pelaporan terkait tanggung jawab sosialnya terhadap dampak sosial yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasi perusahaan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Apakah bukti dari penerapan proses tersebut?
3. Dalam proses tersebut pasti membutuhkan biaya-biaya, bagaimana perusahaan melaporkannya? Apakah biaya-biaya tersebut digabung dalam laporan keuangan

umum perusahaan atau dilaporkan dalam laporan tersendiri yang membahas biaya sosial perusahaan?

4. Faktor penyebab apakah yang dominan dalam mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan biaya sosial tersebut?
5. Berdasarkan apakah perusahaan menerapkan pengukuran biaya sosial?
6. Apakah pengakuan dan penyajian biaya sosial dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku?
7. Apa pengaruh dari pengungkapan dan pelaporan biaya sosial terhadap perusahaan?

Pertanyaan diajukan kepada bagian KSA (*knowledge, skill and abilities*) :

1. Sejauh mana riset yang dilakukan perusahaan dalam pendirian proyek jaringan listrik yang berpotensi berdampak lingkungan dan sosial? Bagaimana pengaruh biaya riset tersebut terhadap laba perusahaan?
2. Bagaimana perencanaan perusahaan atas perbandingan biaya yang akan dikeluarkan untuk kegiatan sosial atau proyek perusahaan yang berdampak lingkungan dan sosial terhadap estimasi manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh?

Lampiran 3

Laporan Posisi Keuangan PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa Timur



PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN CAB KD
PER 31 DESEMBER 2012

URAIAN	31 Des 2012	31 Des 2011
ASET		
Aset Lancar		
1 Kas & Setara Kas	247.806.960	265.463.019
2 Kas Bank Yang Dibatasi Penggunaannya	0	0
3 Deposito	0	0
4 Piutang Mitra Binaan Bersih	0	0
5 Piutang Lain-lain	0	0
6 Beban dibayar dimuka	0	0
7 Pajak dibayar dimuka	0	0
8 Piutang Mitra Binaan Bersih	0	0
Jumlah Aset Lancar	247.806.960	265.463.019
Aset Tidak Lancar		
1 Aset Tetap Bersih	3.454.911	5.257.473
2 Aset Lain-lain	0	0
Jumlah Aset Tidak Lancar	3.454.911	5.257.473
JUMLAH ASET	251.261.871	270.720.492
LIABILITAS DAN ASET NETTO		
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
1 Kelebihan Pembayaran Angsuran	0	0
2 Angsuran Belum Teridentifikasi	0	0
Liabilitas Jangka Panjang		
1 Kewajiban Jangka Panjang	0	0
JUMLAH LIABILITAS	0	0
ASET NETO		
1 Aset Neto Terikat	0	0
2 Aset Neto Tidak Terikat	251.261.871	270.720.492
JUMLAH ASET NETO	251.261.871	270.720.492
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO	251.261.871	270.720.492

Lampiran 4

Laporan Aktivitas PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa Timur



PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN
LAPORAN AKTIVITAS CAB KD
 PER 31 DESEMBER 2012

URAIAN	Bln Des 2012	SD Des 2012	31 Des 2011
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENERIMAAN			
1 Droping Pusat FK	0	0	0
2 Droping Pusat BL	0	0	20.000.000
3 Droping KD/Wil	0	0	-96.482.000
JUMLAH 1	0	0	-76.482.000
PENDAPATAN			
1 Jasa Administrasi Pinjaman	0	4.863.999	466.665
2 Pendapatan Bunga	304.932	4.533.061	4.086.682
3 Pendapatan Lain-lain	0	0	0
JUMLAH 2	304.932	9.397.060	4.553.347
ALOKASI BUMN PEDULI DAN ASET NETO YANG BERA			
1 Alokasi Dana BUMN Peduli	0	0	0
2 ANTT Berakhir Pemenuhan Program	0	0	0
3 ANTT Berakhir Waktu	0	0	0
JUMLAH 3	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN	304.932	9.397.060	71.928.653
BEBAN			
1 Dana Pembinaan Kemitraan	0	27.017.200	0
2 Dana Bina Lingkungan	0	0	20.000.000
3 Beban Administrasi Dan Umum	81.586	16.179.612	-11.151.338
4 Beban Penyusutan Aktiva Tetap	-150.214	1.802.552	1.552.777
5 Beban Penyisihan Piutang	500.000	33.400.001	3.033.335
6 Transfer ke KD/Wil	0	1.607.773.692	1.585.593.198
7 Transfer ke Pusat	0	1.625.000.000	-1.221.624.667
JUMLAH BEBAN	267.800	-28.855.681	333.897.751
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT	572.732	-19.458.621	261.969.098
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER			
1 ANTT Terbebaskan	0	0	0
2 ANTT Penyisihan BUMN Peduli	0	0	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT TEMPORER	0	0	0
PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN			
1 Sumbangan Terikat	0	0	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO TERIKAT PERMANEN	0	0	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET NETO	572.732	-19.458.621	261.969.098
ASET NETO AWAL TAHUN	250.689.138	270.720.492	8.751.394
ASET NETO AKHIR TAHUN	251.261.871	251.261.871	270.720.492

Lampiran 5

Neraca Saldo PKBL PT. PLN (Persero) Cabang Kantor Distribusi Jawa Timur



PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN

NERACA SALDO APJ/CAB KD

PER 31 DES 2012

NO	KOREK/URAIAN	2011	DEBIT	KREDIT	SALDO
1	Aset	270.720.492	1.683.970.754	1.703.429.375	251.261.871
2	Aset Lancar	265.463.019	1.683.970.754	1.701.626.813	247.806.960
3	Kas & Setara Kas	265.463.019	1.650.570.753	1.668.226.812	247.806.960
4	0101010201 Bank PK	265.463.019	1.650.570.753	1.668.226.812	247.806.960
5	Piutang Mitra Binaan	40.925.018	0	33.400.001	7.525.017
6	0101060100 Sektor Industri	1.666.682	0	1.600.000	66.682
7	0101060200 Sektor Perdagangan	8.958.335	0	1.500.000	7.458.335
8	0101060700 Sektor Jasa	30.300.001	0	30.300.001	0
9	Alokasi Penvisihan Piutang Mitra Binaan	-40.925.018	33.400.001	0	-7.525.017
10	0101070100 Sektor Industri	-1.666.682	1.500.000	0	-66.682
11	0101070200 Sektor Perdagangan	-8.958.335	1.500.000	0	-7.458.335
12	0101070700 Sektor Jasa	-30.300.001	30.300.001	0	0
13	Piutang Bermasalah	179.112.000	0	0	179.112.000
14	0103040700 Sektor Jasa	179.112.000	0	0	179.112.000
15	Alokasi Penvisihan Piutang Bermasalah	-179.112.000	0	0	-179.112.000
16	0103050700 Sektor Jasa	-179.112.000	0	0	-179.112.000
17	Aset Tidak Lancar	5.257.473	0	1.802.562	3.454.911
18	Aset Tetap Bersih	5.257.473	0	1.802.562	3.454.911
19	Harga Perolehan Aset Tetap	7.210.250	0	0	7.210.250
20	0102010201 Inventaris Kantor	7.210.250	0	0	7.210.250
21	Akumulasi Penusutan Aset Tetap	-1.952.777	0	1.802.562	-3.755.339
22	0102020201 Inventaris Kantor	-1.952.777	0	1.802.562	-3.755.339
23	Liabilitas dan Ase Neto	270.720.492	1.670.029.374	1.650.570.753	251.261.871
24	Aset Bersih Tidak Terikat	270.720.492	1.670.029.374	1.650.570.753	251.261.871
25	0400000000 Aktiva Bersih Awa Perode	8.751.391	0	0	270.720.492
26	Perubahan Aset Neto Tidak Terikat	261.969.098	1.670.029.374	1.650.570.753	-19.458.621
27	Penerimaan	-76.482.000	0	0	0
28	0402030100 Droqing KD/Wil	-96.482.000	0	0	0
29	0402030300 Droqing dan Pusat BL	20.000.000	0	0	0
30	Pendapatan	4.553.347	0	9.397.060	9.397.060
31	0403010100 Jasa Administrasi Pinjaman	466.555	0	4.863.999	4.863.999
32	0403020100 Jasa Giro	4.086.692	0	4.533.061	4.533.061
33	Dana Pembinaan Kemitraan	0	27.047.200	0	-27.047.200
34	0404010201 Promosi Sektor Industri	0	27.047.200	0	-27.047.200
35	Dana Bina Lingkungan	-20.000.000	0	0	0
36	0404020200 Pendidikan & Pelatihan	20.000.000	0	0	0
37	Beban Umum	-13.104.115	17.982.174	0	-17.982.174
38	0407010000 Beban Adm dan Umum	-11.151.338	16.179.612	0	-16.179.612
39	0410010000 Beban Penusutan Aktiva Tetap	-1.952.777	1.802.562	0	-1.802.562
40	Beban Penvisihan Piutang	3.033.335	0	33.400.001	33.400.001
41	0410010100 Sektor Industri	3.033.335	0	1.600.000	1.600.000
42	0410020200 Sektor Perdagangan	0	0	1.500.000	1.500.000
43	0410070700 Sektor Jasa	0	0	30.300.001	30.300.001
44	Beban Lain-lain	363.968.531	1.625.000.000	1.607.773.692	-17.226.308
45	0412010000 Lain-lain	0	0	0	0

NO	KOREK/URAIAN	2011	DEBIT	KREDIT	SALDO
46	0413010000 Transfer ke Pusat	-1.221.624.667	1.625.000.000	0	-1.625.000.000
47	0413020000 Transfer Ke AP2/Cab	0	0	0	0
48	0413030000 Transfer ke KD/Wil	1.585.593.196	0	1.607.773.692	1.607.773.692

Lampiran 6

Laporan Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
(Persero) Distribusi Jawa Timur.

NO	UNIT/AREA	Korban Bencana Alam	Peningkatan Kesehatan	Pengembangan Sarana Umum	Sarana Ibadah	Penyidikan dan Pelatihan		PELESTARIAN ALAM	BIAYA OPERASIONAL	JUMLAH
						COMMUNITY SERVICES	COMMUNITY EMPOWERING			
1	KANTOR DISTRIBUSI			5.800.000	38.950.000	297.248.200	149.250.200	144.500.000		635.748.400
2	SURABAYA SELATAN		15.000.000	10.000.000	20.000.000					45.000.000
3	SURABAYA UTARA				17.500.000		156.250.000		2.250.000	175.000.000
4	SURABAYA BARAT				25.000.000				2.750.000	45.000.000
5	GRESIK	10.000.000	15.500.000			24.500.000				50.000.000
6	SIDHAR.P			18.000.000	12.500.000		9.000.000	500.000		40.000.000
7	MOYOERTO		4.200.000	3.000.000	17.600.000	20.000.000	11.200.000	9.000.000		60.000.000
8	KEDIRI	3.300.000	4.275.000	2.875.000	6.500.000	22.792.000	8.500.000	9.000.000	1.300.000	53.742.000
9	MADIUN			10.000.000	28.000.000	12.000.000				50.000.000
10	PONOROGO				27.000.000	20.000.000	8.000.000			55.000.000
11	BOJUREGHO	10.000.000	5.000.000	25.000.000		10.000.000	10.000.000			60.000.000
12	MALANG				56.000.000	4.000.000				60.000.000
13	PASIRJARAN		4.000.000	12.500.000	11.000.000	5.000.000	17.500.000			50.000.000
14	SITUBONDO		1.500.000	2.000.000	34.500.000	6.500.000		5.500.000		50.000.000
15	JEMBER		26.500.000	0.500.000	5.000.000	0.000.000				50.000.000
16	BANYUWANGI	5.250.000	8.000.000	20.450.000	21.550.000					55.250.000
17	PAMEKASAN	4.000.000			15.560.000					50.000.000
18	APD JAWA TIMUR				30.000.000					50.000.000
	JUMLAH	32.750.000	83.975.000	119.125.000	361.600.000	478.790.200	369.700.200	158.500.000	6.300.000	1.620.740.400



PT. PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT KANTOR DISTRIBUSI

REALISASI PROGRAM PARTISIPASI PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN
TAHUN 2010

Lampiran 7

Laporan Realisasi Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.
(Persero) Distribusi Jawa Timur.

**PT. PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
UNIT KANTOR DISTRIBUSI**

**REALISASI PROGRAM PARTISIPASI PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN
TAHUN 2011**

NO	UNIT/AREA	Korban Bencana Alam	Peningkatan Kesehatan	Pembangunan sarana Umum		Sarana Ibadah	Pendidikan dan Pelatihan		PELESTARIAN ALAM	BIAYA OPERASIONAL	JUMLAH
				COMMUNITY SERVICES	COMMUNITY SERVICES		COMMUNITY EMPOWERING	COMMUNITY RELATION			
1	KANTOR DISTRIBUSI		171.000.000	42.500.000	101.000.000	282.707.000	38.212.800	375.000.000		810.509.800	
2	SURABAYA SELATAN			23.000.000	15.000.000	7.000.000				30.000.000	
3	SURABAYA UTARA			2.000.000	12.500.000	25.000.000				40.000.000	
4	SURABAYA BARAT			2.000.000	12.500.000	25.250.000			350.000	40.000.000	
5	GR-SIK	10.000.000	12.500.000		19.200.000	7.500.000				45.000.000	
6	SIFARIG		7.000.000		20.500.000	10.500.000				35.000.000	
7	MCJICKERTO		13.500.000		24.000.000	10.500.000				50.000.000	
8	KEDIRI		5.200.000		13.250.000	30.550.000				50.000.000	
9	MADIUN				32.500.000	12.500.000				45.000.000	
10	PONCROGO		5.000.000		15.000.000	24.000.000				45.000.000	
11	BOJONEGURU		23.750.000		24.250.000	5.000.000				50.000.000	
12	MALANG				45.000.000	16.500.000				45.000.000	
13	PASURUAN		5.000.000		1.500.000	12.000.000				30.000.000	
14	SITUBONDO			5.000.000	10.000.000	26.500.000		2.500.000	500.000	45.000.000	
15	JEMBER			13.000.000		7.500.000				45.000.000	
16	BANYUWANGI		16.750.000		13.750.000	38.480.000		3.000.000		45.000.000	
17	PALEMBANG				6.500.000					45.000.000	
18	APD JAWA TIMUR										
	JUMLAH	10.000.000	208.250.000	154.150.000	357.770.000	550.377.000	38.212.800	380.500.000	1.250.000	1.500.509.800	

Lampiran 8

Laporan Laba-Rugi dari System Application Product (SAP) PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur Surabaya 01 PLN Financial Statement Version2 for RI Time 12:08:11 Date 07.02.2013 RFB1A00/8809314 Page 1

Company code 5100 Business area **** Amounts in IDR

C	Comp	Bus	Texte	Reporting period	Comparison period	Absolute	%	Summ
P	code	area		(01.2012-12.2012)	(01.2009-12.2009)	difference	diff	Level
			JASA RUCI					
			Pendapatan (Beban) lain-lain					
			Beban lain-lain ()					
5100	5112	6208000500	Bantuan Korban Bencana Alam (ConDev)	0	60.000.000	60.000.000	100,0	
5100	5119	6208000500	Bantuan Korban Bencana Alam (ConDev)	4.000.000	0	4.000.000		
5100	5124	6208000500	Bantuan Korban Bencana Alam (ConDev)	10.000.000	10.500.000	500.000	4,8	
5100	5125	6208000500	Bantuan Korban Bencana Alam (ConDev)	3.500.000	0	3.500.000		
5100	5110	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	487.818.120	0	487.818.120		
5100	5111	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	0	2.500.000	2.500.000	100,0	
5100	5114	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	5.250.000	2.500.000	2.750.000	110,0	
5100	5115	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	10.000.000	96.600.000	36.600.000	37,9	
5100	5116	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	11.299.000	22.000.000	9.252.000	42,2	
5100	5117	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	12.000.000	0	12.000.000		
5100	5118	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	21.200.000	0	21.200.000		
5100	5119	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	20.500.000	17.000.000	17.000.000	142,1	
5100	5120	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	135.500.000	13.000.000	172.500.000	142,1	
5100	5121	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	15.000.000	0	15.000.000		
5100	5122	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	22.000.000	0	22.000.000		
5100	5123	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	24.500.000	18.300.000	6.000.000	32,4	
5100	5124	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	19.000.000	33.000.000	6.000.000	18,2	
5100	5125	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	77.750.000	0	17.250.000		
5100	5126	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	0	10.300.000	10.000.000	100,0	
5100	5127	6208000400	Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ConDev)	0	30.700.000	30.700.000	100,0	
5100	5111	6208000500	Bantuan Peningkatan Kesehatan (ConDev)	1.000.000	0	1.000.000		
5100	5112	6208000500	Bantuan Peningkatan Kesehatan (ConDev)	8.000.000	0	8.000.000		
5100	5116	6208000500	Bantuan Peningkatan Kesehatan (ConDev)	4.275.000	23.959.800	19.684.000	82,2	
5100	5117	6208000500	Bantuan Peningkatan Kesehatan (ConDev)	4.200.000	0	4.200.000		
5100	5123	6208000500	Bantuan Peningkatan Kesehatan (ConDev)	18.000.000	0	18.000.000		
5100	5124	6208000500	Bantuan Peningkatan Kesehatan (ConDev)	15.500.000	5.000.000	10.500.000	210,0	
5100	5125	6208000500	Bantuan Peningkatan Kesehatan (ConDev)	10.000.000	0	10.000.000		
5100	5126	6208000500	Bantuan Peningkatan Kesehatan (ConDev)	147.000.000	3.065.432	144.834.568	4774,8	
5100	5113	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	6.500.000	37.000.000	28.500.000	77,0	
5100	5114	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	50.000.000	0	50.000.000		
5100	5115	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	20.450.000	4.750.000	15.700.000	350,5	
5100	5116	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	16.675.000	9.000.000	7.675.000	85,3	
5100	5117	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	10.000.000	0	10.000.000		
5100	5118	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	12.000.000	0	12.000.000		
5100	5119	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	0	40.000.000	40.000.000	100,0	
5100	5120	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	12.500.000	8.000.000	4.500.000	56,3	
5100	5121	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	20.000.000	25.000.000	5.000.000	25,0	
5100	5122	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	15.000.000	80.000.000	65.000.000	51,3	
5100	5123	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	4.500.000	0	4.500.000		
5100	5124	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	0	12.500.000	12.500.000	100,0	
5100	5125	6208000600	Bantuan Pengab. Pra/sarana Umum (ConDev)	1.000.000	0	1.000.000		
5100	5111	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	40.500.000	10.500.000	30.000.000	285,7	
5100	5112	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	21.350.000	42.500.000	20.950.000	19,3	
5100	5114	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	0	2.000.000	2.000.000	100,0	
5100	5116	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	6.500.000	5.000.000	1.500.000	30,0	
5100	5117	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	28.000.000	0	28.000.000		
5100	5118	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	12.600.000	0	12.600.000		
5100	5119	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	15.500.000	0	15.500.000		
5100	5120	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	35.750.000	39.000.000	13.250.000	14,0	
5100	5121	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	10.500.000	20.000.000	10.000.000	50,0	
5100	5122	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	23.000.000	0	23.000.000		
5100	5123	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	14.500.000	40.000.000	27.500.000	68,8	
5100	5124	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	8.500.000	0	8.500.000	100,0	
5100	5125	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	1.500.000	22.000.000	20.500.000	93,2	

Distribusi Jawa Timur Surabaya 01 PLN Financial Statement Version2 for RI Time 12:08:11 Date 07.02.2013 RFB1A00/8809314 Page 1

Company code 5100 Business area **** Amounts in IDR

C	Comp	Bus	Texte	Reporting period	Comparison period	Absolute	%	Summ
P	code	area		(01.2012-12.2012)	(01.2009-12.2009)	difference	diff	Level
5100	5127	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	25.000.000	0	25.000.000		
5100	5131	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	0	15.000.000	15.000.000	100,0	
5100	5135	6208000700	Bantuan sarana ibadah (ConDev)	30.000.000	0	30.000.000		
5100	5113	6208000800	Beban Administrasi (ConDev)	0	250.000	250.000	100,0	
5100	5114	6208000800	Beban Administrasi (ConDev)	50.000.000	58.000.000	8.000.000	13,8	
5100	5115	6208000800	Beban Administrasi (ConDev)	0	106.175.000	106.175.000	100,0	
5100	5116	6208000800	Beban Administrasi (ConDev)	10.000.000	78.300.000	68.300.000	81,2	
5100	5117	6208000800	Beban Administrasi (ConDev)	2.250.000	0	2.250.000		
5100	5118	6208000800	Beban Administrasi (ConDev)	0	25.000.000	25.000.000	100,0	
5100	5119	6208000800	Beban Administrasi (ConDev)	2.750.000	0	2.750.000		
5100	5127	6208000800	Beban Administrasi (ConDev)	1.620.740.400	1.032.350.232	588.390.168	57,0	*3*
			Total beban lain-lain ()	1.620.740.400	1.032.350.232	588.390.168	57,0	*2*
			Total Pendapatan (beban) lain-lain	1.620.740.400	1.032.350.232	588.390.168	57,0	*2*
			TOTAL JAWA TIMUR	0	0	0	*1*	

Lampiran 9

Laporan Laba-Rugi dari System Application Product (SAP) PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur OL PLN Financial Statement Version9 for R7 Time 12:08:38 Date 07 02 2013 RPHILAJU/20130214 Page 1

Company code 5100 Business area ****

Amounts in IDR

Comp Code	Row	Text	Reporting period (01.2012-12.2012)	Comparison period (01.2011-12.2011)	Absolute Difference	Rel. dif.	Summ. level
		LABA RUGI					
		Pendapatan (bahan) lain-lain					
		Beban lain-lain (I)					
5100	5124	6208000300 Bantuan Korban Bencana Alam (ComDev)	0	10.000.000	10.000.000-	100,0-	
5100	5103	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	520.000.000	1.400.000	518.500.000	34566,0	
5100	5113	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	16.300.000	16.300.000-	100,0-	
5100	5115	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	4.000.000	4.000.000-	100,0-	
5100	5116	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	24.500.000	24.500.000-	100,0-	
5100	5118	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	50.000.000	50.000.000-	100,0-	
5100	5119	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	36.000.000	36.000.000-	100,0-	
5100	5120	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	12.500.000	12.500.000-	100,0-	
5100	5121	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	10.500.000	10.500.000-	100,0-	
5100	5122	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	45.000.000	45.000.000-	100,0-	
5100	5123	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	19.000.000	19.000.000-	100,0-	
5100	5124	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	19.500.000	19.500.000-	100,0-	
5100	5125	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	30.000.000	30.000.000-	100,0-	
5100	5127	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	21.000.000	21.000.000-	100,0-	
5100	5128	6208000400 Bantuan Pendidikan/Pelatihan (ComDev)	0	7.000.000	7.000.000-	100,0-	
5100	5101	6208000500 Bantuan Peningkatan Kesehatan (ComDev)	0	100.000.000	100.000.000-	100,0-	
5100	5111	6208000500 Bantuan Peningkatan Kesehatan (ComDev)	0	5.000.000	5.000.000-	100,0-	
5100	5123	6208000500 Bantuan Peningkatan Kesehatan (ComDev)	0	16.500.000	16.500.000-	100,0-	
5100	5124	6208000500 Bantuan Peningkatan Kesehatan (ComDev)	0	15.500.000	15.500.000-	100,0-	
5100	5104	6208000600 Bantuan Pengab. Pra-sarana UMM (ComDev)	0	709.000.000	709.000.000-	100,0-	
5100	5114	6208000600 Bantuan Pengab. Pra-sarana UMM (ComDev)	0	22.200.000	22.200.000-	100,0-	
5100	5115	6208000600 Bantuan Pengab. Pra-sarana UMM (ComDev)	0	27.250.000	27.250.000-	100,0-	
5100	5116	6208000600 Bantuan Pengab. Pra-sarana UMM (ComDev)	0	1.500.000	1.500.000-	100,0-	
5100	5118	6208000600 Bantuan Pengab. Pra-sarana UMM (ComDev)	0	5.000.000	5.000.000-	100,0-	
5100	5122	6208000600 Bantuan Pengab. Pra-sarana UMM (ComDev)	0	25.750.000	25.750.000-	100,0-	
5100	5123	6208000600 Bantuan Pengab. Pra-sarana UMM (ComDev)	0	14.000.000	14.000.000-	100,0-	
5100	5108	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	107.623.000	0	107.623.000	100,0+	
5100	5111	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	1.500.000	1.500.000-	100,0-	
5100	5112	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	30.000.000	30.000.000-	100,0-	
5100	5113	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	13.750.000	13.750.000-	100,0-	
5100	5114	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	9.000.000	9.000.000-	100,0-	
5100	5115	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	22.500.000	22.500.000-	100,0-	
5100	5116	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	39.500.000	39.500.000-	100,0-	
5100	5118	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	21.000.000	21.000.000-	100,0-	
5100	5120	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	24.250.000	24.250.000-	100,0-	
5100	5122	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	21.000.000	21.000.000-	100,0-	
5100	5123	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	14.000.000	14.000.000-	100,0-	
5100	5125	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	14.000.000	14.000.000-	100,0-	
5100	5127	6208000700 Bantuan sarana ibadah (ComDev)	0	23.000.000	23.000.000-	100,0-	
5100	5115	6208000800 Bahan Administrasi (ComDev)	0	500.000	500.000-	100,0-	
5100	5114	6208000800 Bahan Administrasi (ComDev)	0	4.000.000	4.000.000-	100,0-	
5100	5123	Total beban lain-lain (I)	627.623.000	1.500.509.000	872.886.000-	58,2-	*3*
		Total Pendapatan (bahan) lain-lain	627.623.000	1.500.509.000	872.886.000-	58,2-	*2*
		TOTAL LABA RUGI	0	0	0	58,2	*1*

Lampiran 10

Daftar Sumber Wawancara

Nama : Mirza
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 13 September 1975
Alamat : Jl. Tegal Sari No. 4-6 Surabaya
Jabatan : SPV Kemitraan Bina Lingkungan
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Nama : Djarot Hadinugroho
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 30 November 1961
Alamat : Taman Pondok P2 Surabaya
Jabatan : Analyst Komunikasi
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Nama : Ahmad Fathurroji
Tempat, tanggal lahir : Jember, 7 April 1988
Alamat : Perum BTB Blok BQ-9 Jember
Jabatan : Junior Analyst Akuntansi dan Keuangan
PT. PLN (Persero) Area Jember

Lampiran 11



PT PLN (Persero)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR

Jalan Embong Trengguli 19-21 Surabaya 60271
Telepon : 031 5340551 s/d 5340657

Facsimile : 031 5310057

Website : www.pln-jatim.co.id

Kotak Pos : 031 6115 / Sbsg

Nomor : 0236 / 330 / DIST-JATIM / 2013
Srt.Sdr. No. :
Lampiran :
Sifat :
Perihal : Ijin Penelitian

17 JAN 2013

Kepada :
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
Jl. Kalimantan No. 37,
JEMBER

Up. Yth. KETUA

Sehubungan dengan surat Saudara No. 1408/UN25.3.1/LT 5/2012 tanggal 12 Desember 2012 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan Ijin Penelitian bagi mahasiswa Saudara :

No.	N A M A	N I M
1.	Aditya Priyanto Putro	090810301041

Untuk pengaturan pelaksanaannya, diminta agar yang bersangkutan menghubungi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Bidang Keuangan Bagian Akuntansi Jl. Embong Trengguli 19 – 21, Surabaya.

Perlu kami sampaikan bahwa :

1. Apabila diperlukan data, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur hanya dapat memberikan yang tidak bersifat rahasia.
2. Ijin Penelitian tersebut dapat dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 2013.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :
Yang bersangkutan.
DM Akuntansi

